

ekstensia

VOLUME 16, TAHUN X - 2003



**PERAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

ekstensia

MAJALAH PENYULUH PERTANIAN

- I. Pelindung : Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
- II. Penanggung jawab : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- III. Pengarah Materi : 1. Ir. M. Ridha Ismail;
2. Ir. Diana Prasastyawati M. Si;
- IV. Tim Penyunting :
- Ketua : Ir. Farida Salim, M.Ed;
- Sekretaris : Ir. Andi Sumarga;
- Anggota : 1. Ir. Zahir Zachri, MA;
2. Ir. Subagio;
3. Ir. Abdulah Syarief;
4. Ir. Hotman;
5. Ir. Sumardi
6. Ir. Bambang Gatut, N. M.Si.;
7. Ir. Syarifuddin Hattab;
8. Ir. Ranny Mutiara;
9. Ir. Erwin Zulkarnaen;
- V. Administrasi : 1. Havid Mahyudin B.Sc.;
2. Joko Samiyono, S.P.
- VI. Keuangan : Darwawis, S.Sos
- VII. Distribusi : 1. Ir. Puji Prabowo.
2. Dodo Handoko

Salam dari redaksi

Ekstensia volume 16 kali ini menyajikan informasi-informasi penyuluhan pertanian dengan tema “Kelembagaan Penyuluhan Pertanian”. Mengapa kami mengangkat tema tersebut ? Karena setelah diberlakukannya otonomi daerah, keadaan kelembagaan penyuluhan di daerah sangat beragam, dan BPP kurang difungsikan.

Pada sajian Ekstensia Edisi 16 ini terdapat komentar-komentar para pakar penyuluhan pertanian, dan informasi-informasi penunjang tentang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Terdapat 7 (tujuh) bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sekarang ini yaitu Badan, Kantor, Balai, Sub Dinas, Seksi, UPTD, Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya, yaitu sekitar 6% belum jelas bentuk kelembagaannya atau dibubarkan. Sedangkan kelembagaan penyuluhan terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang saat ini berjumlah 3.892 unit kurang difungsikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan di beberapa Kabupaten/Kota sudah dihapuskan, atau muncul dalam bentuk lain.

Selain dari masalah beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian dan sulitnya koordinasi dengan instansi terkait terdapat juga percampuran antara fungsi pengaturan dan pengendalian dengan fungsi penyuluhan seperti pada kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk sub din/seksi/kelompok jabatan fungsional/UPTD.

Kami harapan informasi yang disajikan pada Ekstensia edisi 16 ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya para penyuluh pertanian dan para penentu kebijakan, serta para penyelenggara pembangunan pertanian. Sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian di seluruh negeri kita yang tercinta ini. Amin.

Selamat membaca



GAPURA
Salam Dari Redaksi 1

DAFTAR ISI 2

OPINI
Otonomi Daerah dan Reorientasi Program/Program
Penyuluhan Pertanian 3

PROGRAM
Mampukah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Memberdayakan Petani ? 6
Mengembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 12



SOSOK
Kadir Rasyidi dan penerusnya Ir. Hari Kadariyanto 16
Dekminil, Ketua Kelompok Sahabat Tani yang Mendapat Penghargaan 21

WAHANA
Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 24
IPPH Membangun Bangsa dari Desa 32



WAWASAN
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat 37

Mencermati Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Pedesaan Kita 40
Membaca Anomali Iklim Menjadi Peluang Usaha 50



GEMA
Kongres Pemuda Tani Sedunia di Paris, Perancis 53
Sekilas Pertanian di Jepang 55
Rekomendasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional tentang
Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian 58

OTONOMI DAERAH DAN REORIENTASI PROGRAM/PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Kelembagaan penyuluhan di daerah era OTDA kini bermacam-macam, mengapa demikian? Ternyata punya latar belakang yang panjang dan kalau diurut kebelakang akan ditemui ketidakserasian (tidak selaras) antara misi Program/Programa Penyuluhan dan misi Program “**Pembangunan Pertanian**” yang *nota bene* adalah proyek-proyek. Misi penyuluhan ditekankan pada perubahan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani (PSK) lewat tahapan adopsi terhadap suatu teknologi guna meningkatkan pendapatan keluarga petani. Sedang misi proyek-proyek adalah kuantitatif lewat target-target fisik proyek. Akibatnya kalau PPL ikut dalam proyek atau menjadi serdadu proyek maka akan menjadi bumerang bagi penyuluhan itu sendiri sebab petani menjadi manja, terbiasa menjadi petani proyek/kelompok tani proyek, atau jadilah kelompok tani burung merpati/

kelompok tani pedati. Begitu proyek selesai maka kelompok tani tidak jalan alias bubar, karena tidak ada kemandirian pada diri kelompok tani tersebut. Yang terjadi bukan peningkatan PSK (kemandirian) melainkan peningkatan ketergantungan.

Pemerintah Daerah/Bupati dan jajaran Dinas Pertanian di tiap Kabupaten kini tengah berupaya membalikkan paradigma diatas lewat reorientasi Program/Programa Penyuluhan Pertanian di Daerah mengacu pada pola 5 W 1 H dengan pendekatan *Partisipatoris Rural Appraisal* (PRA) kepada petani nelayan. Dengan kebijakan ini diharapkan program *bottom up* dan dapat aspiratif serta sesuai kebutuhan/kondisi petani. Sebagai contoh ada beberapa pilot proyek P4K, agropolitan dan lain-lain tetapi masih bersifat jangka pendek.

Seyogyanya reorientasi Program/Programa Penyuluhan Pertanian di

Daerah diutamakan program jangka panjang, berkelanjutan, berorientasi pada penumbuhan sistem usaha agribisnis dan pola penumbuhan kemandirian aspek politik ormas petani. Untuk membangun usaha agribisnis itu gampang, yang susah itu bagaimana agar usaha itu dapat bersaing, berkelanjutan dan berkerakyatan yang dijelmakan dalam organisasinya yang baik.

Ternyata selama ini kita lemah dalam soal manajerial organisasi petani terbukti HKTI belum optimal melindungi hak-hak petani, sementara KTNA baru diformalkan dan belum mengakar (*grass root*) karena kelompok tani/petani dari kelas pemula sampai dengan utama belum memiliki AD/RT dan belum terdaftar dalam tanda anggota (KTA) KTNA/ HKTI, oleh sebab itu langkah awal pembenahan dan orientasi kedepan sudah semestinya dimulai dari penyusunan Program/Programa Penyuluhan Pertanian tentang sistem organisasi yang representatif, dengan melibatkan partipatif masyarakat tani disamping program/programa yang lain. Organisasi/asosiasi petani akan mempengaruhi pola pikir dan posisi tawar petani. Bukankah lewat organisasi maka diharapkan petani dapat memecahkan masalahnya lewat

musyawarah, demokrasi dan menimbulkan kemandirian?

Marilah kita belajar dari negara tetangga yang telah lebih maju seperti Malaysia dan Thailand. Mereka maju karena SDM nya mampu bersaing, SDM mampu bersaing karena mereka memiliki organisasi yang baik sehingga mampu lebih unggul mengakses teknologi dan informasi, hasilnya efesiensi dan mandiri.

Momentum OTDA hakekatnya telah membuka keran demokrasi itu sendiri, oleh sebab itu peluang ini selayaknya direspon dengan baik. Solusi awal proaktif mestinya datang dari praktisi penyuluhan baik PPL, PPS, para Kepala Dinas Pertanian, Bupati, Gubernur, DPRD sampai Instansi Terkait dan masyarakat peduli petani/ Ormas Tani untuk duduk bersama berembuk dan menggodok Program/Programa Penyuluhan Pertanian di daerah secara bersama-sama yang difasilitasi oleh PERHIPTANI/ Dinas Pertanian setempat. Agendanya antara lain:

1. Menggodok Program/Programa Penyuluhan Pertanian kedepan baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai kebutuhan petani.

2. Menggodok sistem ormas tani yang representatif lewat agenda MUSDA/ MUNAS maupun Kongres bagi asosiasi petani yang baru.
3. Menggodok sistem dan mekanisme Program/Programa Penyuluhan Pertanian di daerah (tepat sarana, sasaran dengan teknologi tepat guna).
4. Menggodok sistem pengawasan, pengaturan, pelayanan dan perizinan bagi ormas tani.
5. Menggodok mekanisme monitoring dan evaluasi Program/Programa Penyuluhan Pertanian serta pengawasan bersama-sama dalam satu team.

Kinerja kita harus beda dan tampil beda karena tolok ukur keberhasilan itu adalah perubahan dari negatif ke positif. Apalagi ini eranya AFTA 2003 dimana ada 3.700 macam komoditas bebas masuk berseliweran di tanah air, maka per-saingan makin ketat. Untuk bisa bertahan dan bersaing maka kita butuh kekompakan, kesatuan gerak langkah baik visi maupun misi dari segenap insan pertanian. Adalah organisasi/asosiasi dapat diandalkan agar dapat bersaing di pasar global, asosiasi dapat menentukan standar-standar tertentu sebagai alat atau teknik menolak produk luar dengan

alasan hambatan non tarif seperti SNI, label halal, isu lingkungan *Fitosanitory/* SPS dan lain-lain yang dikenal dengan istilah *Technical Barter Totrade* (TBT). Akan lebih baik lagi kalau dalam mekanisme Program/Programa, Penyuluhan Pertanian di daerah dapat menggandeng pihak ketiga seperti investor, mitra dan stage holders yang ada serta sinkronisasi/sinergisdengan propenas.

Semoga. (Kusnun)

MAMPUKAH KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN MEMBERDAYAKAN PETANI?

Setelah diberlakukannya UU no. 22 tahun 2002 tentang otonomi daerah, jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan daerah dan beban kerja sesuai dengan analisis organisasi. Salah satu organisasi bidang pertanian yang mengalami perubahan cukup mendasar adalah kelembagaan penyuluhan pertanian, kemudian diikuti dengan perubahan kondisi terutama pada aspek ketenagaan penyuluh di daerah.

Berdasarkan data Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan SDM Pertanian terdapat 7 bentuk kelembagaan penyuluhan di daerah yaitu bentuk Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Dinas, Kantor, BIPP, UPTD, seksi, dan bentuk Badan (eselon II).



BIPP, salah satu bentuk kelembagaan penyuluhan

Bervariasinya bentuk kelembagaan penyuluhan ini karena memang diserahkan pada pemerintah daerah. Yang penting dalam penyelenggaraannya didasari pada filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian.

Diharapkan lembaga penyuluhan pertanian dapat menjamin pembinaan kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian, dapat memberdayakan petani secara partisipatif, dapat menyediakan fasilitas untuk aktifitas petani, dan dapat menjamin ketersediaan informasi agribisnis untuk petani dan penyuluh.

Fungsi Kelembagaan

Prof. Dr. Ir. Margono Slamet, dosen Pasca Sarjana Bidang Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pertanian IPB Bogor menjelaskan bervariasinya struktur kelembagaan penyuluhan yang ada di era otonomi tidak menjadi masalah. Yang penting dalam penyuluhan pertanian harus dibedakan dua fungsi yang harus ada yaitu 1) *Fungsi kebijakan dan perencanaan*. Termasuk disini adalah perencanaan kegiatan, anggaran, dll. Sehingga disini ada kegiatan perencanaan makro (termasuk memperjuangkan anggaran),

dan kegiatan administrasi umum (termasuk merekrut tenaga) dan 2) *fungsi penyuluhan kepada petani*. Fungsi ini harus dipisahkan dari fungsi pertama, dan harus ditangani oleh BPP. BPP harus difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan penyuluhan. Fasilitas utama BPP adalah penyuluhnya, bukan fisiknya. Berapa jumlah penyuluh yang bertugas, dan spesialisasi yang diperlukan tergantung pada potensi wilayah kerjanya. Selain itu BPP harus dekat dengan petani, sehingga minimal wilayahnya adalah kecamatan, dalam satu kecamatan minimal terdapat satu BPP karena BPP adalah ujung tombak penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah *kewajiban pemerintah*. Pemerintah berkewajiban mendidik petani melalui penyuluhan pertanian. Bukan swasta. Kalau pada akhirnya swasta akan menambah, boleh saja. Tetapi kewajibannya ada pada pemerintah. Karena itu sangat diperlukan Undang-Undang Penyuluhan pertanian. Kalau Undang-Undang sudah ada, diharapkan nanti peran dan tanggung jawab penyuluhan pertanian baik di Pusat, Propinsi, dan Kabupaten akan jelas. Selain itu, tujuan dan fungsinya pun akan lebih jelas. Termasuk dalam hal ini anggarannya. Sebagai contoh, yang sekarang terjadi banyak penyuluh yang tidak mengikuti pelatihan, dalam hal ini tak jelas tanggung jawab siapa, Pusat atau daerah? Contoh lainnya dalam hal meningkatkan kemampuan agribisnis,

diperlukan banyak sekali informasi atau media untuk menambah keterampilan penyuluh di BPP. Ini pun tak jelas tanggung jawab siapa? Hal-hal seperti ini sebaiknya ditangani secara ilmiah yang didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan sebagai bahan dalam menyusun perencanaan kegiatan agribisnis.

Pernyataan ini diperkuat oleh seorang tokoh penyuluhan pertanian Dr. Ir. Soedradjat Martaamidjaja, yang menegaskan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat lapangan atau di tingkat usahatani (seperti BPP) itu mesti dipertahankan kehadirannya. Karena kelembagaan penyuluhan tersebut merupakan basis dari kegiatan petani. Katakanlah itu kelembagaan penyuluhan pertanian paling depan.

Ditegaskan pula oleh beliau, untuk mengukur ketepatan atau keakuratan dari kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat usahatani ini (BPP) atau apapun namanya adalah sbb :

1. Seberapa jauh kelembagaan itu mampu dimanfaatkan oleh petani sebagai basis untuk mengembangkan kegiatannya. Bukan semata-mata sebagai unit kerja pemerintah untuk memberikan bantuan kepada petani. Tetapi yang paling penting tolok ukurnya seberapa jauh kelembagaan penyuluhan itu diakui, digunakan dan dimanfaatkan oleh petani untuk mengembangkan

kegiatannya sendiri secara mandiri. Kelembagaan penyuluhan itu harus sebagai basis kegiatan usaha petani, basis kegiatan rembug petani, basis kegiatan rencana pengembangan usaha petani. Karena itu hubungan antara kepala lembaga itu dengan petani/ kontaktani sangat erat sekali.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat usahatani yang ideal yaitu dikelola oleh petani/ kontaktani sendiri. Kelembagaan penyuluhan pertanian bisa saja dibangun oleh pemerintah atau dibangun secara gotong royong oleh masyarakat. Sebagai contoh, di Kabupaten Indramayu kelembagaan penyuluhan di tingkat usahatani didirikan sendiri oleh para petani dan diakui oleh para petani sebagai tempat mereka. Fasilitasnya dimanfaatkan untuk kegiatan mereka dengan program mereka sendiri.

2. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat usahatani yang penting adalah programnya. Ciri utama berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat usahatani adalah adanya program penyuluhan pertanian tiap tahun secara teratur yang dibuat oleh petani dan untuk para petani sendiri. Program penyuluhan pertanian adalah inti dari kegiatan lembaga penyuluhan pertanian. Pemerintah

hanya sebagai pendukung saja, yaitu memfasilitasi kegiatan para petani. Ada yang berpendapat sudah saatnya petani harus mandiri. Sehingga harus lepas dari peran pemerintah. Pendapat seperti itu, salah. Mandirikan petani, berarti membuat petani mampu mengerjakan sendiri, dan tetap kita fasilitasi seperlunya. Pemerintah membatu kelembagaan penyuluhan (BPP) dengan kegiatan-kegiatan dimana petani belum mampu memfasilitasi sendiri. Misalnya, penyampaian informasi. Mungkin saja petani bisa, akan tetapi mereka tak punya waktu. Kelembagaan penyuluhan (BPP) tadi disuplai bahan-bahan informasi oleh kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.

Selanjutnya Dr. Ir. Soedrajat Martaamidjaja mengatakan pula, kelembagaan penyuluhan di tingkat usahatani yang ideal, yaitu dikelola sendiri oleh para kontaktani, dan pemerintah memperbantukan para penyuluh. Bila kelembagaan penyuluhan itu sudah dikelola oleh para petani/ kontaktani sendiri, maka tidak mustahil dikemudian hari penyuluh itu memperoleh honor dari para petani yang mengelola kelembagaan penyuluhan (BPP) itu. Untuk menuju keadaan yang ideal tadi tentunya pemerintah harus membantu mereka. Karena itulah bila akan membangun

kelembagaan penyuluhan pertanian harus paralel dengan membangun kepemimpinan petani, yaitu membangun kekuatan dari organisasi petani.

Penataan Organisasi

Mengenai organisasi sektor pertanian di Indonesia saat ini dipisahkan berdasarkan komoditas. Margono Slamet menandakan semestinya dilakukan analisa, penataan berdasarkan fungsi. Baik instansi pertanian pusat atau daerah harus mempunyai tiga fungsi utama yang terpisah yaitu 1) *Fungsi perencanaan, pengaturan, dan pengawasan*. Fungsi ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang disiapkan untuk itu, 2) *Fungsi pelayanan*. Fungsi ini melayani masyarakat/petani terhadap kebutuhan pupuk, bibit, insektisida, dan lainnya yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian, 3) *Fungsi penyuluhan pertanian*. Dalam hal penyuluhan pertanian ini perlu ada kesamaan persepsi tentang penyuluhan pertanian. Jangan sampai terjadi masyarakat desa merasakan perlu penyuluhan, sedang menurut para birokrat, penyuluhan tidak perlu. Semoga perbedaan persepsi ini dapat dihilangkan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut Margono Slamet menyatakan bahwa ketiga fungsi diatas jangan dicampur aduk, harus dibedakan karena cara pendekatannya pun sangat berbeda. Selama ini fungsi pertama

ditangani bersama dengan fungsi kedua. Sebenarnya harus ditangani secara terpisah. Apalagi dengan fungsi ketiga.

Sedangkan menurut Soedradjat Martaamidjaja, untuk kelembagaan tingkat kabupaten masih diperlukan **kelembagaan penyuluhan pertanian** Kegiatan pokok kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, yaitu komunikasi dan informasi. Kelembagaan penyuluhan tersebut sebagai lembaga informasi yang diperlukan untuk para petani melalui kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat usahatani. Kurang pas kalau ada kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten yang menyelenggarakan kursus untuk petani secara langsung. Itu adalah pekerjaan kelembagaan penyuluhan di tingkat usahatani (BPP). Tingkatan kegiatan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, yaitu keinformasian. Kegiatan lainnya yaitu melakukan pengkajian-pengkajian dan hasilnya disebarluaskan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat usahatani. Karena harus ada kerjasama yang baik antara kontaktani, penyuluh dan peneliti. Itu yang disebut 3 in 1.

Selanjutnya dikatakan kurang tepat, kalau kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten "dicantelkan" di bawah salah satu dinas yang ada. Sebaiknya kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten harus independen, di bawah Bupati.

Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten jangan sampai di bawah dinas, paling sedikit setingkat, dan kalau bisa lebih tinggi. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten itu otonom. Tidak bernaung di bawah program pemerintah. Kelembagaan penyuluhan itu punya program sendiri yang dasar pikirnya kepentingan petani bukan kepentingan semata-mata pemerintah.

Mengenai **kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi** sebaiknya sifatnya koordinatif, yang ditangani oleh para fungsional penyuluh pertanian. Kelembagaan penyuluhan ini tugasnya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian tingkat provinsi itu. Kelembagaan ini tak usah dibentuk secara struktural (seperti BIPP). Ditangani oleh para fungsional penyuluh pertanian yang dikelompokkan dalam satu unit kerja fungsional. Unit kerja ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Kemudian mengenai kelembagaan penyuluhan tingkat pusat, menurut Soedradjat memang diperlukan untuk memberikan arahan kepada penyuluh pertanian di daerah, beberapa keperluan yang harus dilakukan kelembagaan penyuluhan pusat/nasional adalah : **Pertama** adalah standarisasi kompetensi penyuluh pertanian. Artinya, salah satu hal yang harus menjadi bagian utama kegiatan kelembagaan penyuluhan di pusat adalah diklat. Terutama diklat

yang menyangkut kompetensi-kompetensi khusus dari penyuluh pertanian itu. Sehingga perannya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi penyuluh pertanian, keahlian-keahlian penyuluh pertanian, standar-standar, dsb. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat pusat harus menjadi sentra atau tempat dikembangkannya sertifikasi dari kompetensi penyuluh itu. **Kedua**, memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan penyuluhan pertanian kepada Menteri.

Lebih jauh menurut Margono Slamet, penyuluh sekarang "mati suri". Karena suplai informasi macet. Alur informasi sampai ke penyuluh perlu ditata kembali. Data jumlah penyuluh di Indonesia harus jelas, harus ditata kembali karena sekarang banyak penyuluh yang pensiun. Dan tak sedikit pula yang beralih tugas ke struktural atau alih fungsi lain. Mungkin saja jumlah penyuluh sekarang tinggal sekitar 20.000 orang. Ini berarti masih diperlukan rekrutmen tenaga penyuluh.

Pengangkatan penyuluh disini harus berdasarkan kemampuannya sebagai penyuluh. Satu hal yang dapat membantu kegiatan penyuluhan adalah keberadaan perguruan tinggi yang tidak diberi tanggung jawab pembangunan pertanian. Sebenarnya hal ini dapat diatur sehingga perguruan tinggi berperan dalam pembangunan. Dosen-dosen yang kurang pekerjaan dapat membantu kekurangan tenaga penyuluh.

Perlu pemikiran menyeluruh bagaimana agar kelembagaan penyuluhan berfungsi dengan baik. Sebagai contoh jangan sampai keberadaan penyuluh dan peneliti dalam satu instansi diperlakukan beda. Biaya penelitiannya dan tunjangan fungsionalnya juga jangan berbeda.

Mengenai hambatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, menurut Margono Slamet yang paling utama adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang menangani penyuluhan pertanian banyak yang tidak menguasai pengetahuan penyuluhan pertanian. Hal ini menjadi sebab utama kelemahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dianggap rendah. Banyak orang merasa mengerti penyuluhan pertanian, padahal mereka tak pernah belajar. Kalau keadaan seperti ini dipertahankan, bagaimana keadaan penyuluhan pertanian masa datang ?

Lain halnya, menurut pandangan Soedradjat Martaamidjaja, dari sisi petani tidak ada hambatan. Tetapi dari sisi aparat masih ada dua kelompok pendapat yang belum sepaham dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kedua kelompok pendapat tersebut, yaitu (1) apakah penyuluhan pertanian tugas pemerintah atau tugas petani. Masih kuat anggapan di daerah mengisyaratkan bahwa penyuluhan pertanian itu tugas pemerintah. Petani tinggal tunggu saja terima bagian. (2)

Ada lagi kelompok lain yang beranggapan, penyuluhan pertanian itu bagian dari kegiatan usahanya petani. Karena itu harus dilaksanakan oleh petani sendiri. Tugas pemerintah hanya sebatas memfasilitasi saja.

Kalau yang berkuasa terdiri dari orang-orang yang menganggap petani itu tugasnya pemerintah, artinya petani yang mensukseskan program pemerintah, maka yang memikirkan kelembagaan penyuluhan pertanian adalah pemerintah. Kalau yang berkuasa itu berpandangan bahwa penyuluhan pertanian itu adalah kegiatannya para petani, akan mengarahkan kelembagaan penyuluhan pertanian itu menjadi kegiatan yang dikelola oleh petani sendiri.

Dalam hal usaha pemberdayaan petani, Margono Slamet menyatakan bahwa secara struktural petani berada di bawah. Mestinya mereka harus di atas. Semua harus melayani petani, karena merekalah yang bekerja untuk kita semua. Kalau kita perhatikan, sebenarnya investasi petani ditanah pertanian trilyunan rupiah, semua uang dari mereka sendiri tanpa bantuan pemerintah. Mereka tak menerima subsidi, dan tenaga mereka tak dibayar. Karena itu tidak adil rasanya kalau keadaan tidak dirubah. Padahal kita semua rakyat Indonesia untuk bisa hidup perlu petani. Tanpa petani kita semua tak bisa makan. (FS, DS)

MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam rangka upaya untuk mendudukkan, memerankan, memfungsikan, serta menata kembali penyuluhan pertanian, maka salah satu upaya pokoknya adalah “Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian”.

Di Pusat

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan nasional penyuluhan pertanian dan bahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Di Provinsi

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi

dikoordinasikan oleh ASDA II Provinsi dengan sekretariatnya di Balai Diklat Pertanian/Agribisnis di Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penyuluhan pertanian, Balai Diklat Pertanian/Agribisnis tersebut dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi yang juga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan dan program penyuluhan pertanian provinsi serta yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.

Di Kabupaten/Kota

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dikoordinasikan oleh ASDA II Kabupaten/Kota dengan sekretariatnya di unit kerja pengelola dan penyelenggara penyuluhan pertanian, baik yang berstatus Badan/Kantor/Balai/UPTD Penyuluhan Pertanian maupun yang

berstatus Sub Dinas/Bagian dan Seksi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dan peyelenggara penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota yang juga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten/ kota dan bahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kesembilan kewenangan yang **wajib** dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada saat ini 94% dari total Kabupaten/Kota mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Badan/ Kantor/Balai/Sub Dinas/UPTD/Kelompok Penyuluh Pertanian.

Tugas dan wewenang wajib Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian menurut SK Menteri Dalam Negeri No. 130-67 / Tahun 2002 adalah :

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2. Penyusunan, perbanyak dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Penumbuhan dan kembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluhan pertanian, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani.
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

Upaya pokok untuk lebih memerankan dan memfungsikan kelembagaan penyuluhan pertanian dan menata sistemnya adalah sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian dengan memperluas kelembagaan/sub sistem yang terlibat, termasuk kelembagaan agribisnis.
- (b) Mengembangkan jaringan kerjasama antara lembaga

penyuluhan pertanian dengan pihak-pihak terkait.

- (c) Mendorong terbentuknya satu lembaga penyuluhan pertanian yang mengelola kegiatan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (d) Mendorong terbentuknya Komisi Penyuluhan Pertanian di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
- (e) Memperkuat sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari Pusat sampai Desa.
- (f) Menjadikan BPP sebagai basis kegiatan penyuluhan pertanian untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis.
- (g) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan penyuluhan pertanian swasta/swakarsa.
- (h) Mengembangkan lembaga profesi penyuluhan pertanian.
- (i) Mensosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota hendaknya dapat melaksanakan secara penuh, terencana dan terkoordinasi ke-9 wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Alternatif bentuk dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota adalah :

1. Menjadi kelembagaan penyuluhan pertanian yang berdiri sendiri dalam bentuk Badan/Kantor.
2. Memanfaatkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada sekarang dengan menekankan pada pelaksanaan ke-9 wewenang.
3. Kalau hanya satu Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota maka lembaga penyuluhan pertanian dapat berupa: (a) Sub Dinas, (b) Kelompok penyuluh Pertanian, dan (c) UPTD

Di Kecamatan

Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan merupakan instalasi/sub ordinat dari kelembagaan penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian BPP/Kecamatan membentuk Tim Penyuluhan Pertanian. Dengan adanya Tim Penyuluhan Pertanian ini maka di BPP dapat dikembangkan Klinik Inkubator Agribisnis (KIA).

BPP atau lembaga penyuluhan pertanian yang dibentuk di kecamatan, diharapkan dapat menjamin :

- a) Tersedianya fasilitas untuk menyusun program dan rencana kerja penyuluhan pertanian yang tertib.
- b) Tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar.
- c) Terselenggaranya kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, petani/ kontaktani-nelayan dan pelaku agribisnis lainnya.
- d) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan bagi petani dan bagi penyuluh pertanian.
- e) Tersedianya fasilitas untuk membuat percontohan dan pengembangan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis dan ketahanan pangan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian BPP ini harus tetap dipertahankan karena BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang paling dekat dengan petani.

Di Desa

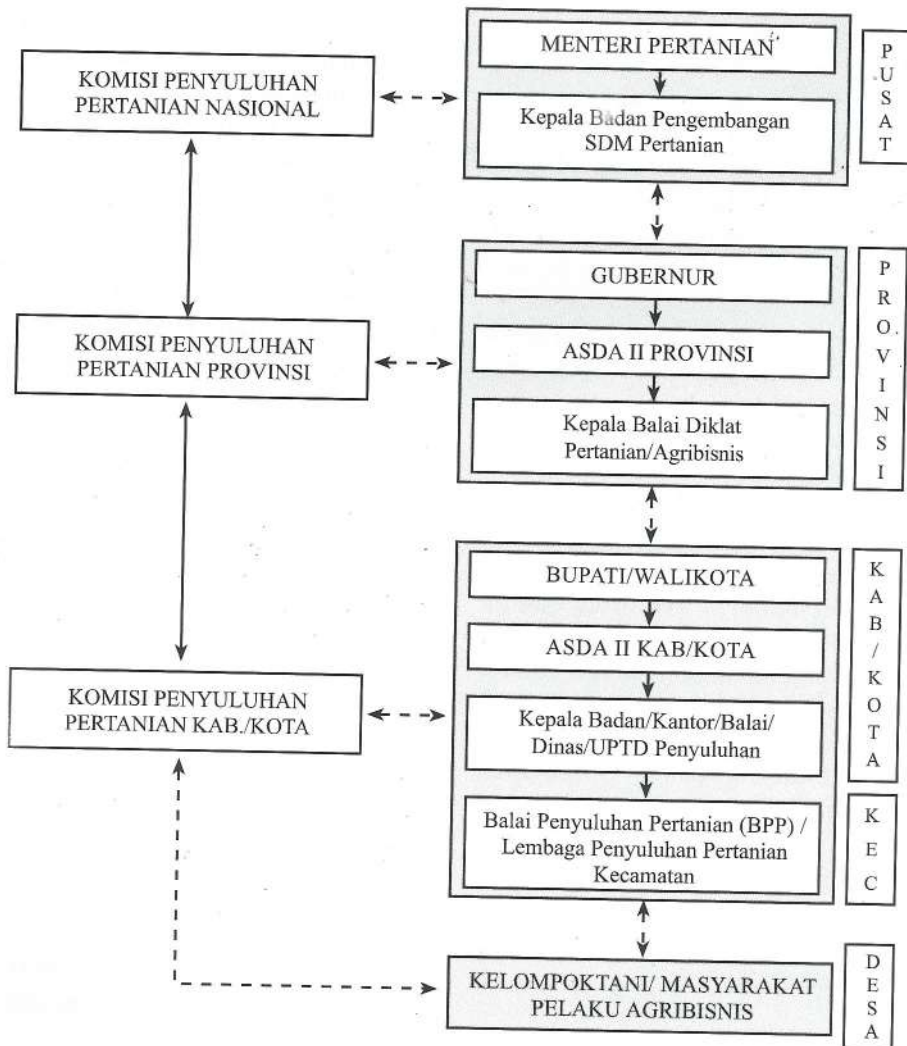
Kelembagaan penyuluhan pertanian di desa adalah kelompok tani/ organisasi petani. Dengan dikembangkannya penyuluhan partisipatif, kelompok tani/ organisasi

petani adalah mitra kerja sejajar penyuluh pertanian yang bersama-sama menyusun program, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi dan mengambil manfaat dari kegiatan penyuluhan pertanian.

Hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah hubungan fungsional, sedangkan hubungan kelembagaan penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota dengan BPP/ kelembagaan penyuluhan pertanian Kecamatan adalah hubungan operasional. Sementara itu hubungan antara Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota adalah juga hubungan fungsional. Hubungan antar kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut dapat dilihat pada gambar.

Instrumen pengembangan

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Pembuatan petunjuk umum.
3. Sosialisasi dan dialog.
4. Pendekatan-pendekatan baik melalui surat maupun kunjungan lapangan.
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan khusus secara reguler.
6. Bantuan anggaran (dekonsentrasi dan pembantuan).



Gambar. Hubungan antar Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

KADIR RASYIDI dan penerusnya IR. HARI KADARIYANTO

- *Mengamalkan pengetahuan bidang pertanian kepada mereka yang memerlukan.*
- *Batu sebagai kota seribu satu bunga.*

Bagi masyarakat tani, khususnya Malang Jawa Timur tentunya sudah tak asing lagi dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Tulung Karya yang berdomisili di desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiayu, Kota Batu. Mengapa demikian? Karena P4S ini cukup terkenal dengan tanaman apelnnya, selain itu dalam kegiatan sehari-harinya ada salah seorang sosok yang sudah cukup dikenal baik di kalangan masyarakat tani itu sendiri maupun di kalangan civitas akademis, swasta dan pemerintah.

Bapak **Kadir Rasyidi**, demikian nama lengkapnya, dilahirkan di kota apel Batu Malang pada tanggal 9 September 1930. Hingga saat ini, ia masih menggeluti bidang pertanian khususnya hortikultura sebagai pilihan hidupnya dan sekaligus ketua P4S Tulung Karya.

Pada waktu Ekstensia berkunjung pada bulan Juli 2003 yang lalu, penampilan sosok ketua P4S ini tidak segesit seperti 10 atau 15 tahun yang

lalu, hal ini tentunya disebabkan usianya yang semakin bertambah. Sehingga pada waktu kunjungan kami juga didampingi oleh wakil ketua P4S Tulung Karya yang sekaligus putra dan sebagai penerus cita-cita mulia Bapak Kadir Rasyidi, ia adalah **Ir. Hari Kadariyanto**.



Bapak Mudjijo (seketaris umum IPPH) sedang menerima tamunya dari dinas lingkup Pemda Kabupaten Kediri.

Awal bertani

Berawal dari bertanam kentang, bawang dan asparagus pada tahun 1955,

Pak Kadir demikian panggilan akrabnya, memulai kegiatannya di bidang pertanian bersama dengan orang tuanya yang juga seorang petani. Setelah itu, pada tahun 1960 memulai menanam apel jenis lokal dan pada tahun 1970 berkembang dengan berbagai jenis apel seperti Rome Beauty, Manalagi dan apel Hijau Australia.

Dari tahun ke tahun kegiatan usaha taninya semakin berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Disini Pak Kadir tidak tinggal diam, ia juga mengikuti perkembangan yang ada yaitu dengan memulai menanam jenis tanaman lain yang dibutuhkan di pasaran dan mengembangkan tanaman-tanaman langka yang belum banyak dibudidayakan di Indonesia seperti peach, pir, plum dan kesemek.

Disela-sela melakukan kegiatan usaha-taninya, Pak Kadir yang lulusan sederajat SMTP pada masa dulu, juga selalu menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan ketrampilannya dengan mengikuti berbagai kursus dan pelatihan seperti kursus pengetahuan umum, tatabuku, bahasa Inggris, jurnalistik, pertanian dan perkoperasian yang semuanya diikuti di dalam negeri.

Selain itu, Pak Kadir juga pernah mengikuti pelatihan atau magang di luar negeri seperti teknik perbanyakan mangga dan durian di Bangkok pada tahun 1992 dan mempelajari agribisnis apel, anggur, peach, pir dan kesemek di Australia.

P4S Tulung Karya

Berbicara masalah permagangan, sebetulnya sudah sejak tahun 1970 Pak Kadir memulainya. Berawal dari menerima para petani pemegang di lingkungannya yang ingin belajar mengenai kegiatan usaha taninya, kemudian dari tahun ke tahun kegiatan ini semakin berkembang. Sejalan dengan munculnya istilah P4S, maka sampai sekarang kegiatan ini lebih semakin berkembang dengan diberi nama P4S Tulung Karya.

Dengan bermodal tanah 2 ha yang ditanami tanaman hortikultura dan sarana lain yang ada seperti ruang kelas yang menampung 40 orang, ruang tamu dan ruang pertemuan. P4S ini banyak didatangi para peminatnya yang ingin mengetahui, meningkatkan ilmu dan ketrampilannya di bidang hortikultura. Pada waktu Ekstensia berkunjung, ada beberapa tamu yang magang seperti kelompok tani dari Jakarta Timur dan Sulawesi Selatan, beberapa petugas pertanian dari Kupang dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Melihat sarana yang ada jelas tidak mencukupi untuk kegiatan permagangan. Tapi Pak Kadir tidak habis pikir, dengan menggunakan balai desa yang ada dan dukungan para petani lainnya, para pemegang dititipkan pada keluarga tani lainnya sesuai dengan tujuan magang yang ingin diperoleh. Misalnya, jika ada

pemegang yang ingin belajar tanaman kentang maka ia dititipkan ke keluarga tani yang sedang membudidayakan kentang, begitu juga dengan komoditi lainnya.

Dalam mengelola P4S ini, Pak Kadir dibantu oleh 5 (lima) orang anggotanya dan petani lainnya. Sampai saat, sudah banyak jenis pelatihan atau permagangan yang telah dilakukan seperti budidaya kentang, apel, asparagus, bawang dan wortel. Peserta magang tidak berasal dari petani saja melainkan juga berasal dari civitas akademik dan swasta seperti mahasiswa UGM Yogyakarta, IPB Bogor, UNS Solo, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Brawijaya Malang, SPP Malang dan PT. Hasfarm Jakarta. Selain itu tidak ketinggalan para pemegang petani Afrika dan Korea.

Kalau ditanya tentang tujuan dan pendirian P4S Tulung Karya ini, Pak Kadir yang beristrikan ibu Sukiami dengan 9 anak yang telah mencapai gelar sarjana ini, dengan tegas menjawab bahwa tujuan pendirian P4S ini adalah untuk mengamalkan pengetahuan dalam bidang pertanian kepada mereka yang memerlukan.

Selanjutnya ada satu hal yang perlu diketahui pada diri Pak Kadir ini yaitu mengenai prestasinya yang diperolehnya, seperti pada tahun 1956 telah berhasil melakukan penanaman asparagus dari sisa-sisa orang Belanda dengan cara mengambil bijinya. Tahun 1961 berhasil melakukan grafting dan

perompesan daun apel. Tahun 1992, ia juga berhasil melakukan grafting pir, plum dan peach serta tahun 1993 melakukan penyilangan apel Ana dan Manalagi, Rome Beauty serta Prince Nobel.

Selain prestasi, beberapa penghargaan dan tanda jasa telah diperolehnya seperti Satya Lencana 1993 dari Bapak Presiden, Perintis penggalakan tanaman ekspor non migas tahun 1985, Veteran pejuang kemerdekaan RI 1982, Juara II katagori stand dalam rangka Brawijaya Fair 1991, Juara karnaval mobil 1971, simposium hortikultura 1990 dan tanda jasa atau penghargaan yang lainnya.

Generasi Penerus

Semangat untuk mengamalkan pengetahuan di bidang pertanian bagi mereka yang memerlukan melalui P4S Tulung Karya memang masih melekat tinggi pada sosok Bapak Kadir Rasyidi. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya usia (sekarang lebih kurang 74 tahun) sudah tentu perlu dipikirkan adanya kaderisasi atau penerus cita-cita yang mulia ini.

Ir. Hari Kadariyanto, yang sekarang menjadi wakil ketua P4S Tulung Karya dan sekaligus putra dari Bapak Kadir, merupakan salah satu sosok yang layak untuk meneruskan perjuangan bapaknya. Alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang tahun 1980 dan sekarang

menjabat sebagai Ketua Departemen Pemuda KTNA dan Ketua Koperasi Petani Bumiaji Batu ini memang tampak *low profil*, walaupun telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraihny, ia tidak mau terlalu menonjolkan diri.

Sebagai penerima tongkat estafet bapaknya, Mas Hari demikian panggilan akrabnya, memang merupakan sosok yang cukup sibuk dan cukup dikenal dikalangan warga Kota Batu. Selain sebagai pengusaha di bidang pertanian, kegiatan-kegiatan lainnya juga sering ia ikuti seperti seminar, pelatihan dan bahkan pernah menjadi salah seorang panitia pemilihan bupati kota Batu. Disela-sela kesibukannya ia tak lupa masih terus ikut melayani para tamunya yang datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Sulawesi Selatan dan NTT untuk mengikuti magang di P4S Tulung Karya.

Setelah agak lama berbincang-bincang dengan Ekstensia dan bersama mengunjungi lahan tanaman bunga yang berdekatan dengan tempat wisata Selekt, ternyata diam-diam Mas Hari mempunyai obsesi yang cukup tinggi. Apa obsesinya? Ia ingin menjadikan "**Kota Batu sebagai Kota Seribu Satu Bunga**". Gimana bisa muncul gagasan ini Mas Hari ?

Sepulang dari Jepang

Berawal dari mengikuti pelatihan agribisnis selama lebih kurang 40 hari di Jepang, tepatnya bulan Pebruari 2003 yang lalu. Sebagai seorang wakil duta bangsa yang direkomendasikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Pada waktu pelatihan memang materinya terfokus pada masalah pasca panen, tentunya ini juga sesuai dengan perkembangan bidang yang digeluti sekarang. Namun demikian, karena keingintahuan untuk mengembangkan diversifikasi usaha khususnya tanaman bunga-bunga, di waktu senggang setelah mengikuti pelatihan bapak 2 anak yang beristrikan Elok Handayani yang seorang paramedis ini, mencoba memanfaatkan waktu luang



Merawat bunga di taman merupakan salah satu aktivitas Mas Hari sehari-hari.

untuk mencari aneka macam bibit bunga yang diinginkan.

Alhasil, apa yang dicari telah ditemukan di negara matahari terbit ini, berawal dari ia mencoba mengunjungi aneka taman bunga di Jepang, pada kesempatan ini pula tak lupa ia membeli aneka bibit-bibit tanaman bunga untuk dibawa pulang ke Indonesia. Sepulang dari Jepang, ia mencoba menanam bibit bunga tersebut pada lahan seluas 7.000 m² dan sekaligus mengadakan suatu eksperimen berupa persilangan antara jenis tanaman yang satu dengan jenis yang lainnya.

Pada waktu Ekstensia berada di lahan bunga, sudah terdapat lebih dari seratus macam bunga mulai dari galur murninya sampai hasil persilangannya seperti dari jenis bunga *Gaillardia*, *Mirabilis*, *Patrinia*, *Cruspedia*, *Exacum* dan *Gaura*. Bunga-bunga hasil persilangan ini pernah ia coba bawa pada suatu acara seminar di hotel Hyatt Surabaya dimana yang hadir peserta selain dari dalam negeri juga peserta dari luar negeri seperti Australia, ternyata peserta dari negara Kanguru ini sangat merespon bunga-bunga hasil persilangan dari Mas Hari.

Dari hasil analisis usahatani secara kasar, dari 1 pohon bisa menghasilkan 4-7 kuncup bunga, 1 m² bisa menghasilkan 20 kuncup bunga kertas, sehingga jika dikonversikan dalam 1 ha

dengan harga per kuncup Rp. 1.000,- maka akan diperoleh pendapatan kotor sekitar 20 juta/ha. Sementara itu untuk biaya produksi per hektar seperti sewa lahan, tenaga kerja dan sarana produksi belum dianalisa secara usaha tani karena pada waktu Ekstensia berkunjung usaha diversifikasi usaha bunga ini baru dalam proses awal. Namun demikian, diperkirakan usaha ini cukup memberikan harapan karena prospek pasarnya cukup menggairahkan. Jenis bunga-bunga ini dalam waktu dua sampai dengan tiga bulan sudah bisa berproduksi dan tidak mengenal musim artinya setiap waktu bisa berproduksi terus, prospek dari pasar juga cukup menggembirakan sehingga perlu untuk dikembangkan.

Ke depan ia ingin menjadikan diversifikasi usaha bunga ini bisa berkembang di kota Batu, sehingga bila ada petani atau pemegang dari berbagai luar daerah yang ingin belajar tentang pengembangan jenis bunga-bunga tidak usah pergi ke Jepang, tetapi cukup datang di P4S Tulung Karya, Batu.

Satu hal lagi yang perlu diketahui, bahwa bunga-bunga hasil persilangan ini di kota Batu sendiri belum pernah ada, dengan demikian muncullah suatu ide atau gagasan jika kelak hasil persilangan dari aneka bunga ini berhasil ia akan mewujudkan kota Batu sebagai kota seribu satu macam bunga. (BGN)

DEKMINIL

Ketua Kelompok “Sahabat Tani” yang mendapat penghargaan

Dekminil, sosok seorang lelaki yang ramah, masih muda, baru berumur 35 tahun. Dikaruniai 3 orang anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ia adalah penduduk asli Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tepatnya di Jorong Gunung, Kenegarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Karung. Suatu lokasi yang terletak di dataran tinggi. Sebagai ketua kelompok “Sahabat Tani”, ia dikenal pandai dalam mencari dan memanfaatkan peluang pasar dan kemitraan. Kelompok tani “Sahabat Tani” merupakan kelompok usaha agribisnis sayuran, yang terkenal kekompakan dan kerjasamanya yang baik. Produk usahataniannya sayuran sehat tanpa pestisida, dan sayurannya sudah mendapat pasaran secara rutin. Produksinya 870 ton sayuran pertahun. Pada tahun 2002 kelompok “Sahabat Tani” ini mendapat penghargaan agribisnis sayuran tingkat nasional.

Sebagai ketua kelompok, dia menyebarkan informasi teknologi, dan melakukan sanitasi serta packing/ pengemasan di lahan usahanya. Jenis dan cara pengepakan sudah disesuaikan



Dekminil, Ketua kelompok tani “Sahabat Tani”

dengan permintaan konsumen, sehingga sebelum dilempar ke pasar disimpan dahulu di ruang pendingin. Jenis sayuran yang dikelolanya adalah jenis sayuran dataran tinggi, yang terdiri dari tomat, buncis, brocoli, wortel, cabe, bawang merah, kol, lettuce, dan paprika. Rencana kedepan akan banyak memproduksi sayuran eksotik, untuk memenuhi pasar ke Pekanbaru. Kelebihan kelompok Sahabat Tani dalam

usaha agribisnis sayuran adalah hanya menggunakan pupuk organik. Penggunaan pestisida hanya dilakukan bila diperlukan saja, sehingga kadar pestisidanya tidak berada di atas ambang batas. Untuk mengetahui kadar pestisidanya dilakukan tes di Laboratorium Pestisida Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat.

Dengan pengaturan pola tanam, kelompok pak Dekminil sudah dapat memproduksi pertahun tomat 360 ton, cabe 96 ton, wortel 120 ton, buncis 60 ton, brokoli 30 ton, paprika 12 ton, kol 120 ton, sawi 60 ton, dan lettuce 12 ton. Seluruhnya dalam 1 tahun diproduksi 870 ton. Jumlah produksi setiap komoditas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. *Produksi sayuran per tahun kelompok "Sahabat Tani"*

No.	Komoditas	Produksi (Ton)
1.	Tomat	360
2.	Brokoli	30
3.	Cabe	96
4.	Buncis	60
5.	Wortel	120
6.	Paprika	12
7.	Lettuce	12
8.	Kol	120
9.	Sawi	60
Total		870

Keunggulan kelompok tani ini mampu mengatur rotasi tanaman, sehingga dapat memenuhi permintaan dari beberapa perusahaan. Tingginya produksi sayuran kelompok Sahabat Tani berawal dari ikut sertanya kelompok ini pada pameran "Pekanbaru Fair" di Pekanbaru pada tahun 2000. Keikutsertaan pada pameran tersebut atas bantuan dari Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat. Manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pameran tersebut banyak permintaan. Untuk kontinuitas pemasaran, kelompok bermitra dengan beberapa perusahaan. Mengapa dilakukan kemitraan?

Menurut pak Dekminil bila bermitra dengan perusahaan stabilitas harga lebih terjamin, berbeda dengan pasar tradisional yang biasanya terdapat permainan harga. Karena itu kekompakkan dalam kelompok dan kerjasama dengan kelompok tani lain ditingkatkan. Keterampilan juga ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan tentang perlakuan pasca panen dengan Dinas Pertanian, dan pelatihan tentang pemasaran dengan Dinas Perdagangan. Memang awalnya cuma tomat, tapi kemudian dapat memenuhi permintaan sayuran-sayuran lain, bahkan kedepan berkembang pada sayuran eksotik.

Jenis insektisida yang digunakan kelompok Sahabat Tani lebih banyak menggunakan insektisida alami seperti akar tumbuhan, kecubung atau tembakau. Penggunaan insektisida alami ini atas anjuran Informasi Pusat Agen Hayati (IPAH) yang terdapat di setiap BPP. Keunggulan tomat yang diproduksi kelompok ini adalah terakreditasi di Laboratorium Pestisida Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat.

Perlu diketahui, dalam pembuatan kompos yang digunakan untuk pertanaman sayuran adalah "Triko", yang

dibuat dari sejenis predator. Triko berfungsi dapat mempercepat proses pembusukan. Hasilnya dalam 15 hari kompos jadi hancur, dan dalam 21 hari sudah dapat dipakai. Triko ini dapat dibuat sendiri, dari 1 kg biang bisa menjadi 5-6 kg. Bantuan Pemda Batusangkar dalam pembuatan kompos adalah dalam pengadaan mesin kompos. Pada setiap kecamatan terdapat mesin kompos. Sedangkan untuk pemasaran lokal, Pemda membangun Pusat Sayuran Organik ditepi jalan Padang Panjang, Bukittinggi. (FS)



Jenis sayuran di Pusat Sayuran Organik.

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) produk hukum yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kedua undang-undang tersebut telah mengakibatkan berubahnya pola hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berbagai bidang kewenangan.

Sebagai konsekwensi dari perubahan pita kewenangan tersebut, pada tahun-tahun awal pelaksanaan otonomi daerah, telah terjadi penataan kelembagaan birokrasi pertanian pada semua kegiatan pemerintahan. Ditingkat Pusat, kelembagaan pertanian berkonsentrasi pada perumusan kebijakan, sedangkan kelembagaan ditingkat Provinsi hanya melakukan tugas-tugas terbatas yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pemerintahan dan pembangunan termasuk bidang pertanian pada umumnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota.

Salah satu kelembagaan bidang pertanian yang sangat cepat mengalami perubahan adalah kelembagaan

penyuluhan pertanian. Terjadinya perubahan berbagai bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan gambaran respon Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menterjemahkan kedua undang-undang diatas, khususnya yang diatur dalam PP nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahap implementasinya kewenangan dan keleluasaan tersebut diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing daerah dan cenderung ditafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing daerah. Kecenderungan tersebut telah membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara signifikan, hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing daerah.

Terbitnya PP nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam hubungannya dengan Penataan Kelembagaan Diklat Pertanian dan Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat memberikan penjelasan tidak hanya mengenai jenis dan bentuk

organisasi perangkat daerah tapi juga memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai rambu-rambu pembentukan organisasi perangkat daerah.

Untuk menyamakan persepsi diantara pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian mengenai implementasi PP nomor 8 tahun 2003 dan sekaligus sosialisasi Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian menyelenggarakan Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

Salah satu kelembagaan bidang pertanian yang sangat cepat mengalami perubahan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian.

Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian untuk tahun 2002 dilaksanakan pada 100 Kabupaten dan 488 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada 29 Provinsi. Program ini untuk tahun 2003 dikembangkan menjadi 184 Kabupaten dan 919 BPP serta kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi.

Tujuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah (1) tercapainya persepsi yang sama tentang



BPP, kelembagaan petani di desa.

implementasi PP No.8/2003 diantara Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; (2) tercapainya persepsi yang sama tentang Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diantara para penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat dan Daerah; (3) diperolehnya kepastian dan kejelasan tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kalangan para penyelenggara penyuluhan pertanian di Daerah, baik yang berkaitan dengan kewenangan Pusat maupun Daerah; serta (4) dipahaminya konsep Akuntabilitas Publik.

Forum Koordinasi yang dihadiri Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota (Kepala Badan/Kantor/ Balai/UPTD/Kepala Dinas dan Unit Kerja yang mengelola Informasi dan Penyuluhan Pertanian) lokasi Proyek Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, diselenggarakan dalam 3 (tiga) regional di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta.

Regional I, II dan III

Regional I dilaksanakan pada tanggal 11 sd. 14 Mei 2003 di Hotel Pusako, Bukittinggi, Sumatera Barat dengan peserta 62 orang dari 11 Provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel dan Kalbar).

Regional II dilaksanakan pada tanggal 6 sd. 9 Juni 2003 di Hotel Celebes, Makassar Sulawesi Selatan dengan peserta 69 orang dari 13 Provinsi (Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Kalteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua).

Regional III dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sd. 3 Juli 2003 di Hotel Ambarukmo, DI Yogyakarta dengan peserta 53 orang dari 5 Provinsi (Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Banten).

Rumusan Pertemuan

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

- Penyuluhan pertanian di Kabupaten/ Kota dalam perubahan lingkungan strategis (Globalisasi, Otonomi Daerah, Kebijakan Pembangunan Pertanian, kondisi petani dan keluarganya) perlu tetap dijamin pelaksanaannya sesuai dengan 9 (sembilan) kewenangan wajib Kabupaten/Kota dan

berdasarkan kepada falsafah, prinsip dan misi penyuluhan pertanian.

- PP No. 8/2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah hendaknya tidak menjadi masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sepanjang 9 (sembilan) kewenangan wajib Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan.
- Perlu revitalisasi penyuluhan pertanian yang mengakomodasikan kesetaraan diantara kelembagaan yang mengemban fungsi penyuluhan dan fungsi regulasi.
- Kelemahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dimasa lalu perlu direformasi menjadi pendekatan partisipatif dengan metode dialogis dan menempatkan petani sebagai manajer usahataniannya melalui upaya pemberdayaan.
- Dinamika yang berkembang di berbagai daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu disikapi secara positif dan dinamis, mengingat penyuluhan mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan pertanian, untuk memberdayakan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, agar kinerja penyuluhan pertanian dapat ditingkatkan terus.
- Penyuluhan pertanian dimasa depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut reposisi penyuluhan pertanian, redinamisasi

kepemimpinan petani-nelayan, reorientasi program, restrukturisasi dan reposisi tugas serta pementapan kelembagaan penyuluhan pertanian.

- Penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus akuntabel. Untuk itu sistem akuntabilitas penyuluhan pertanian harus dibangun, dan setiap unit kerja perlu menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi dan target kerja. Prinsip akuntabilitas harus dilaksanakan secara jujur dan transparan.

Perlu revitalisasi penyuluhan pertanian yang mengakomodasikan kesetaraan diantara kelembagaan yang mengemban fungsi penyuluhan dan fungsi regulasi.

Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian

- Diperlukan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sebagai jaminan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berdasarkan falsafah dan prinsip perlindungan kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya terhadap hal-hal yang merugikan. Salah satu pasal dalam UU tersebut hendaknya mengenai Pelayanan Sipil. Penyuluhan pertanian merupakan pelayanan sipil yang tidak bisa diprivatisasi/diwastakan karena merupakan sepenuhnya kewenangan wajib pemerintah.

- Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian perlu mengakomodasi pasal yang mengatur agar dalam DAU dialokasikan dana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kalau Pemda tidak mengalokasikan maka untuk tahun berikutnya DAU tidak diberikan.

Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sebagai jaminan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berdasarkan falsafah dan prinsip perlindungan kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya.

Program dan Program Penyuluhan Pertanian

- Program penyuluhan pertanian yang dituntut untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, hendaknya mencerminkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*), bersifat terpadu, spesifik lokasi, berorientasi agribisnis, responsif gender serta berwawasan lingkungan.
- Program Penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan harus mencerminkan perencanaan dari bawah yang disusun melalui suatu proses partisipatif yang dijabarkan dalam rencana kerja setiap penyuluh pertanian. Identifikasi masalah petani perlu dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisa data sosial, ekonomi dan gender,

sehingga permasalahan dapat dilihat secara komprehensif.

- Pendekatan penyuluhan partisipatif perlu disosialisasikan dan diaplikasikan oleh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran aktif petani dan keluarganya beserta pelaku agribisnis dalam menuhkan kemampuan dan keberdayaan, peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraannya.
- Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja, selain tujuan dan input, program dan program penyuluhan pertanian perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai output, outcome, benefit dan impact.

Program dan program hendaknya mencerminkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*), bersifat terpadu, spesifik lokasi, berorientasi agribisnis, responsif gender serta berwawasan lingkungan.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

- Kondisi penyuluhan pertanian yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya penyuluhan pertanian kurang memenuhi harapan, sehingga untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis diperlukan kelembagaan penyuluhan yang mampu mengelola sumberdaya dengan semua sektor terkait.

- Tiga opsi menjadi pilihan dalam pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota yaitu : (a) struktur yang ada dipertahankan, (b) jika Dinas satu, pilihan UPTD yang tepat, dan (c) nama lain, tetapi tetap dalam satu manajemen.
- Langkah-langkah yang diperlukan : (a) Pusat, segera menerbitkan Undang-undang Penyuluhan Pertanian; (b) Daerah, sosialisasi tentang pentingnya keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
- Perlu ditinjau kembali SK Menteri Pertanian No. 39/1997 tentang Pembinaan Kelompok-tani-Nelayan dalam bentuk penerbitan Pedoman Umum Pengembangan Organisasi Petani, sedangkan yang berkenaan dengan pembinaan kelompok dalam bentuk kelas-kelas kelompok hendaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan 9 (sembilan) kewenangan wajib pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota, termasuk penyuluhan pertanian.

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan strategis untuk memberdayakan petani dan masyarakat agribisnis lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pengembangan sumberdaya (tenaga, dana, sarana dan metode). Untuk dapat

memberdayakan petani-nelayan dan keluarganya, maka penyuluh pertanian harus diberdayakan lebih dahulu.

- SK Menkowsabngpan No. 19/1999 dan Keppres No. 15/2003.
 - Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian menuntun profesionalisme penyuluh pertanian sesuai yang ditetapkan oleh Keputusan Mengkowsabngpan No. 19/1999. Untuk itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang produktif, efisien dan efektif dilakukan antara lain dengan memenuhi kebutuhan akan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan petani serta masyarakat agribisnis yang dilayaninya.
 - Dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi daerah mengenai pendidikan formal penyuluh pertanian, disarankan agar Menteri Pertanian mengajukan dispensasi pemberlakuannya sampai tahun 2005.
 - Agar daerah segera melakukan impassing (penyesuaian) jabatan penyuluh pertanian sesuai dengan Keputusan Menkowsabngpan No. 19/1999, sehingga besar tunjangan jabatan penyuluh pertanian tersebut dapat

disesuaikan dengan Keppres No. 15/2003.

- Adapun biaya untuk mengakomodasi kenaikan tunjangan tersebut dimasukkan dalam anggaran dana penyeimbang pada DAU. Untuk itu perlu Surat Edaran Menteri Keuangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Agar daerah segera mengirimkan dan melengkapi data penyuluh honorer sebelum tahun 1991 ke Pusat. Rencana pengangkatan Penyuluh Pertanian honorer sebelum tahun 1991 ini, juga tetap harus mempertimbangkan penyuluh pertanian honorer sesudah tahun 1992.
- Kebutuhan tenaga penyuluh pertanian dapat dihitung dengan berbagai alternatif sehingga masing-masing daerah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi.
- Penyuluh dan peneliti dituntut untuk terus meningkatkan *knowledge* dalam arti selalu meningkatkan pengetahuan, wawasan, ethos kerja dan dedikasi sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam jabatannya.
- Untuk meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian agar memfasilitasi Diklat Keahlian di dalam maupun di luar negeri.

- Penetapan pemberian penghargaan :
 - Penetapan pemberian penghargaan bagi penyuluh pertanian teladan dilakukan dengan mencalonkan penyuluh pertanian berprestasi disuatu wilayah kerja (BPP/Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi) berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian.
 - Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian Teladan ditujukan bagi penyuluh pertanian yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Penetapan pemberian penghargaan bagi penyuluhan pertanian Non PNS dapat mengacu pada pedoman bagi PNS dan pelaksanaannya diserahkan pada Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan indikator dan kriteria penilaian yang dikembangkan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota atau Provinsi.
 - Oleh karena calon penerima penghargaan yang diusulkan setiap tahun dari Kabupaten/ Kota atau Provinsi kepada Tim Penilai Tingkat Nasional hanya 1 (satu) orang, maka penerima penghargaan dari Menteri Pertanian diusulkan agar ditingkatkan jumlahnya. Dengan demikian untuk yang tidak

terjaring menerima penghargaan Presiden dapat menerima penghargaan Menteri Pertanian secara berjenjang. Penye- rahan penghargaan tidak harus di Pusat, dapat dilaksanakan di daerah dikaitkan dengan acara tertentu.

Kolaborasi

- Pengembangan kolaborasi merupakan kunci dalam pengembangan jejaring kerja (*networking*). Selanjutnya kolaborasi dengan pihak-pihak lain juga dapat menjadi strategi untuk mengkomplemen kekurangan-kekurangan yang ada pada suatu dinas/instansi.
- Kolaborasi antara penelitian dan penyuluhan dalam rangka mempercepat penyaluran dan adopsi teknologi hasil penelitian yang spesifik lokasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan sangat penting, karenanya kedua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk itu pra kondisi yang kondusif perlu diciptakan, antara lain melalui peningkatan apresiasi terhadap jabatan penyuluh pertanian. Selain itu guna mewujudkan paradigma penelitian "*farmers first and farmers last*", penyuluh diusulkan untuk duduk dalam Komisi Peneliti Pertanian di Provinsi.
- Hubungan keterkaitan kerja (*linkage*) di-antara petani-penyuluh-peneliti (BPTP dan Perguruan

Tinggi) banyak menjadi tuntutan, namun sampai saat ini belum optimal karena SDM yang ada kurang memadai.

- Bila dikelola dengan baik, kolaborasi diantara seluruh *stakeholder* dalam penyuluhan pertanian akan menghasilkan sinergi guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan berkelanjutan program.
- Petani berpotensi dan menjadi perekat kolaborasi diantara beberapa pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.

Guna mewujudkan paradigma penelitian "*farmers first and farmers last*", penyuluh diusulkan untuk duduk dalam Komisi Peneliti Pertanian di Provinsi.

Agropolitan

- Agropolitan merupakan suatu gerakan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis (baik perkebunan, sentra usaha ternak, sentra produksi sayuran dan komoditi lainnya), yang dilakukan dengan mensinkronkan dan mensinergikan berbagai potensi yang ada pada pihak pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat agribisnis. Sejak awal 2002, gerakan ini telah dilaksanakan di 53 Kabupaten, baik yang inisiatif dilakukan oleh pemerintah maupun

oleh masyarakat agribisnis secara swakarsa.

- Kunci keberhasilan Gerakan Agropolitan terletak pada kolaborasi yang saling menguntungkan di antara pelaku agribisnis dari hulu sampai hilir, serta dukungan sarana dan prasarana fisik, kelembagaan pelayanan usaha agribisnis dan inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan komoditas yang diunggulkan di suatu kawasan.
- Kestinambungan Gerakan Agropolitan tergantung pada dukungan luas masyarakat agribisnis, dan kejelasan rencana induk (rencana pengembangan jangka panjang) yang dirinci ke dalam rencana-rencana aksi konkrit tahunan.

Tindaklanjut dari pertemuan ini, diharapkan para penyelenggara penyuluhan pertanian dapat melakukan *advocacy* dan mampu meyakinkan Bupati/Walikota dan pihak legislatif serta seluruh *stakeholder* bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian amat penting dan menjadi kewenangan wajib Kabupaten/Kota disamping juga perlunya memahami konsep-konsep sistem dan usaha agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Forum Koordinasi Regional Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian merupakan forum yang strategis untuk menggali permasalahan dan mendapat masukan dari daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. (LA).

IPPH

MEMBANGUN BANGSA DARI DESA

Demikian motto dari Ikatan Persaudaraan Petani Hortikultura (IPPH) Karesidenan Kediri Jawa Timur dalam kiprahnya membangun bangsa tercinta di republik ini”.

Ikatan Persaudaraan Petani Hortikultura atau disingkat dengan IPPH Karesidenan Kediri Jawa Timur, merupakan salah satu Kelembagaan Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang agrobisnis hortikultura (sayuran), dengan wilayah kerja meliputi tiga kabupaten yaitu kabupaten Kediri, Blitar dan Nganjuk. Sekretariat kelembagaan ini berada di Jalan Langkat No. 52 Singgahan Palem, Pare, Kediri, Jawa Timur. Telp. (0354) 394585. Email : ipph@hotmail.com.

Berawal dari Keterpurukan

Berawal dari rasa senasib dan sepenanggungan para petani yang sekaligus pedagang hortikultura/sayuran di pasar Pare Kediri, dimana mereka memiliki nasib sama yang menimpa dirinya yaitu pada saat harga komoditi hortikultura (cabe, tomat dan bawang merah) lagi turun drastis atau anjlog dan membuat keadaan para petani pedagang hortikultura mengalami keterpurukan. Kondisi inilah yang memicu para petani pedagang hortikultura di pasar Pare

Kediri untuk bergerak mengatasinya. Berawal dari pembicaraan non formal mereka di pasar tentang naik turunnya harga komoditi hortikultura. Kemudian berkembang, mereka sepakat mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan permasalahan yang dirasakan bersama.

Dari beberapa kali pertemuan. muncul diantara mereka suatu ide atau gagasan untuk mendirikan suatu asosiasi atau ikatan petani hortikultura. Berdirinya ikatan ini tidak semudah yang dibayangkan, tetapi melalui proses yang cukup alot dan panjang. Berkat kegigihan dan keuletan para petani pedagang hortikultura yang memiliki nasib yang sama serta dorongan dari salah seorang yang bisa dibilang konseptor sekaligus KTNA Kabupaten Kediri yaitu *Bapak Mudjijo*, para petani



Bapak Kadir Rasyidi sedang berbincang-bincang dengan tamunya dari Fakultas Pertanian Unibraw Malang.

pedagang hortikultura tersebut akhirnya sepakat untuk mendirikan suatu asosiasi atau ikatan petani hortikultura.

Tepatnya tanggal 23 Juni 1998, ide atau gagasan mereka dengan nama Ikatan Persaudaraan Petani Hortikultura (IPPH) dengan jumlah awal anggota sebanyak 43 orang, telah terdaftar pada Notaris Habib SH dengan Badan Hukum/ Akta Notaris Nomor 07 Tahun 1998. Bentuk dari kelembagaan ini adalah Kelembagaan Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang agrobisnis hortikultura/sayuran.

IPPH ini awalnya hanya bersifat paguyuban dimana kegiatannya terfokus pada pertemuan rutin dan arisan para anggotanya. Sejalan dengan perkembangan pasar, kegiatan juga ikut berkembang dimana pada setiap pertemuan anggota yang dilaksanakan 2 bulan sekali dengan tempat yang berpindah-pindah, dibahas pertukaran informasi baik itu yang bersifat teknologi budidaya maupun perkiraan saatnya produksi yang dikaitkan dengan jumlah tanaman yang ada di lingkungan para anggotanya.

Potensi yang dimiliki

Seperti halnya kelembagaan lainnya, IPPH dalam membangun bangsa dari desa telah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa potensi yang dimiliki IPPH

dalam kiprahnya membangun bangsa dari desa antara lain :

- a. Memiliki basis produksi komoditi hortikultura/sayuran yang bisa dikordinir pasarnya secara kontinyu sepanjang masa (melalui kontrak kerja sama).
- b. Memiliki anggota yang mayoritas petani muda dengan semangat tinggi, aktif dalam setiap kegiatan, inovatif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
- c. Memiliki pengaruh kuat di lingkungannya.
- d. Memiliki peluang kemitraan baik dengan pedagang, pengusaha agroindustri, lembaga riset maupun perguruan tinggi.

Dengan adanya potensi-potensi ini, jelas keberadaan IPPH sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari, oleh dan untuk petani legalitasnya akan diakui baik itu oleh petani, pengusaha dan pemerintahan daerah. Sehingga kedepan IPPH ini, diharapkan bisa berfungsi sebagai pusat konsultasi dan pusat informasi bagi para anggota maupun petani lainnya yang berkaitan dengan pengembangan komoditi hortikultura. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat belajar atau magang bagi petani lainnya.

Organisasi

Sejak berdirinya tahun 1998 hingga sekarang, IPPH sudah dua kali

mengalami pergantian atau perubahan kepengurusan dan struktur organisasi. Dari awal, struktur kepengurusan IPPH terdiri dari seorang ketua dibantu oleh 5 orang staf yang meliputi wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, struktur kepengurusan IPPH juga mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya gambaran kepengurusan organisasi IPPH 2002-2005 sebagai berikut.

Susunan Kepengurusan IPPH Masa Bakti 2002-2005

1. *Ketua Umum* : Supriadi
2. *Wakil Ketua Umum* : Sukoco
3. *Wakil Ketua Wilayah* :
 - *Kepung Pare* : Arif Budi W, SE
 - *Gurah, Wates* : Hery D. K, SH
 - *Papar Nganjuk* : Sunyoto
 - *Blitar, Tulungagung* : M. Sulcha, SP
4. *Sekretaris Umum* : Mudjijo
5. *Wakil Sekretaris* : Prayitno, SH
6. *Bendahara Umum* : Tutut S. U, SP
7. *Wakil Bendahara* : Mujab Nawawi
8. *Ketua Bidang* :
 - a. *Organisasi dan Kaderisasi* : Ir. Agus Hariyono
 - b. *Pengembangan Usaha* : Mohamad Sujud
 - c. *Litbang* : Drs. Suryadi

Kegiatan IPPH

Secara umum kegiatan IPPH Karesidenan Kediri lebih bersifat mengkoordinasi para anggotanya dalam

upaya untuk menjalin kemitraan dan kerja sama pemasaran dengan pihak luar. Sementara itu, untuk permodalan, budidaya atau produksi masing-masing komoditi hortikultura diserahkan sepenuhnya kepada anggota IPPH yang menyebar di tiga kabupaten. Disini peran IPPH lebih cenderung memberikan informasi-informasi berkaitan dengan saat tanam, kebutuhan pasar akan komoditi hortikultura dan perkembangan teknologi terbaru.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris IPPH periode 2002-2005 yaitu bapak Mudjijo dapat ditarik benang merah bahwa secara garis besar ada 5 kegiatan dari IPPH ini, dimana kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang belum terealisasi semua dan kegiatan pengembangan baru lainnya. Kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan pertemuan rutin para anggota setiap 2 bulan sekali. Kegiatan ini merupakan ikatan tali persaudaraan dari para anggota. Disini para anggota dari masing-masing wilayah saling bertukar informasi untuk pengembangan IPPH.
2. Kegiatan pelayanan jasa, yang meliputi pelayanan jasa untuk para anggota seperti pengadaan sarana produksi dan pelayan jasa untuk pihak luar seperti melayani tamu dan petani lain yang ingin magang atau belajar tentang hortikultura dan biopestisida.

3. Kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Bidang litbang ini diketuai oleh bapak Drs. Suryadi. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah percobaan tanam cabe dan tomat dengan penerapan *biopestisida*. Biopestisida ini merupakan produk unggulan litbang dari IPPH bekerja sama dengan UGM Yogyakarta. Produk ini memanfaatkan kotoran dan kencing hewan sapi yang diproses secara alami untuk dijadikan biopestisida.
4. Kegiatan kerjasama dengan pihak luar, kegiatan ini lebih ditekankan bagai-mana menjalin kerjasama dan kemitraan dengan para pengusaha untuk diversifikasi usaha dan jaminan pemasaran. Bidang pengembangan usaha ini diketuai

oleh generasi muda yaitu Mohamad Sujud.

5. Kegiatan Pengembangan Organisasi, kegiatan ini diketuai oleh Ir. Agus Hariyono. Beberapa kegiatan diantaranya pembenahan organisasi, kaderisasi dan pengembangan sumberdaya manusia melalui seminar, diklat atau magang di tempat lain yang lebih maju.

Secara garis besar, kegiatan sejak IPPH berdiri hingga sekarang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu 1) kegiatan yang baru pada tahap negosiasi dan masih perlu pengembangan lebih lanjut, serta 2) kegiatan lanjutan yang sedang berjalan. Kegiatan yang baru pada tahap negosiasi diantaranya ekspor ke Singapura dan kerja sama tanam kubis dengan Asperti, kerjasama tanam buah Naga Merah dengan PT. Jolo Sutro Nusantoro Pasuruan, rencana kerjasama

pemasaran produk anggota IPPH dengan PT. Jolo Sutro Nusantoro,



Salah satu aktivitas ketua bidang pemasaran usaha (M. Sujud) sedang memeriksa tanaman hortikultura di lahannya.



Ketua IPPH bapak Supriadi sedang menjelaskan proses pembuatan biopestisida pada tamunya di tempat litbang biopestisida.

kerja sama dengan PT. Sighenta dalam rangka standarisasi produk anggota IPPH dan mencari kerjasama pemasaran produk hortikultura yang lain dengan pihak manapun. Kegiatan lanjutan yang sedang berjalan diantaranya kerja sama pemasaran buncis dan kacang panjang dengan CV. Semut Bertani. Kegiatan ini ditangani oleh bapak Sunyoto yang dimulai sejak Mei 2002 dengan kapasitas produksi lebih kurang 3 ton per dua hari, kerjasama pemasaran tomat ke Kalimantan yang ditangani oleh bapak Sulcha dan bapak Sukoco dengan kapasitas lebih kurang 5 ton per hari.

Manfaat IPPH

Dalam perjalanannya lebih kurang 5 tahun, banyak manfaat dari IPPH ini yang dirasakan baik oleh para anggotanya

maupun pihak-pihak luar. Sebelum ada IPPH para petani pedagang hortikultura/sayuran sering mengalami keterpurukan pada saat harga komoditi hortikultura anjlok, tetapi dengan adanya IPPH paling tidak para anggota bisa mengantisipasi atau meminimalisir masalah tersebut dengan cara pertukaran informasi diantara anggota berkaitan dengan saat tanam komoditi apa yang paling

sesuai untuk dipasarkan pada waktu berikutnya. Disamping itu, banyak tawaran-tawaran kerjasama dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasar komoditi hortikultura walaupun masih dalam taraf negosiasi.

Keberadaan IPPH juga dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak luar, seperti pada setiap pertemuan rutin anggota, ada beberapa formulator dari sarana produksi baik itu yang berasal dari benih, pupuk, pestisida dan alsintan yang ikut menawarkan produk-produknya. Juga banyak para tamu dari berbagai daerah dan pemegang yang ingin belajar tentang pengembangan biopestisida dan pengembangan tanaman hortikultura/sayuran. Selamat beraktivitas IPPH, semoga cita-citamu membangun bangsa dari desa bisa segera terwujud. (BGN)

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Kabupaten Tanah Datar dengan ibukota Batu Sangkar merupakan lokasi yang patut dikunjungi di Sumatera Barat. Karena apa? Disanalah terdapat Istana Basa Pagaruyung, pusat Kerajaan Pagaruyung. Konon, masyarakat Minangkabau berasal dari salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar. Luas wilayahnya 1.336 km² atau 133.600 hektar merupakan Kabupaten terkecil di Sumatera Barat. Jumlah penduduknya 327.114 jiwa (berdasarkan sensus tahun 2000). Kegiatan usaha sektor pertaniannya memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar

37% bagi kegiatan ekonomi pada tahun 2001. Komoditas pertanian utama terdiri dari padi, jagung, sayuran organik, sapi, perkebunan rakyat, dll. Pada tahun 2001 bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar mendapat penghargaan Satuan Karya Ketahanan Pangan Tingkat Nasional.

Menurut Bupati Tanah Datar H. Masriadi Martinus, perubahan Kabupaten Tanah Datar tak dapat hanya mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Yang potensial justru adalah sumber daya manusia. Karena itulah sumber daya manusia menjadi sasaran pembangunan. Apabila terjadi perubahan sikap mental, lalu terjadi perubahan sosial, maka pada akhirnya akan terjadi peningkatan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin karena itulah begitu besarnya perhatian Bapak bupati pada sumber daya manusia pertanian, yaitu penyuluh dan petani. Bahkan menurut bapak bupati, "Penyuluh sangat diperlukan, apalagi dalam rangka resesi ekonomi dan otonomi daerah. Tanpa para penyuluh pertanian tak mungkin para petani dapat menjadi pelaku agribisnis. Bukankah sekarang sudah ada perubahan paradigma, dari membangun sektor pertanian menjadi membangun sistem dan usaha agribisnis?".

Untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian dan memotivasi para penyuluh pertanian agar trampil dalam berusahatani berwawasan agribisnis, tak sedikit dukungan



H. Masriadi Martinus, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

pemerintah daerah Tanah Datar. Pemerintah daerah menyediakan dana yang terdiri dari:

1. Dana Produktif

Dana ini merupakan *reward* bagi penyuluh pertanian yang berprestasi dan kreatif dalam melakukan usahatani yang digunakan sebagai demplot bagi petani. Dana ini dipinjamkan kepada penyuluh tanpa bunga, dan dikreditkan selama 3 tahun. Diharapkan dana ini menjadi "*profit center*" bagi penyuluh. Tentunya besarnya keuntungan tergantung pada kreatifitas usahatani yang dilaksanakan penyuluh tersebut. Untuk tahap pertama telah terpilih 20 orang penyuluh yang mendapatkan dana Rp 10.000.000 untuk masing-masing penyuluh. Direncanakan pada tahun 2003 akan diberikan lagi pada sekitar 10 orang. Dari data yang kami peroleh, yang berusahatani ikan mas dan nila 3 orang, ayam potong 3 orang, cabe dan sayuran 4 orang, penggemukan sapi potong 7 orang, sapi bibit 2 orang, dan sutra alam 1 orang.

2. Dana Bantuan Perjalanan Tetap

Dana ini diperuntukkan para penyuluh yang tidak mendapatkan Dana Produktif.

Pada tahun 2002 disediakan sekitar Rp 90.000.000,- untuk menunjang kegiatan penyuluhan. Persyaratan penerima dana bantuan ini diantaranya:

- membuat Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK) tiap periode tanpa putus..
- membuat Rencana Kerja Penyuluh (RKP)
- membuat rencana dan laporan supervisi (Penyuluhan setiap Kabupaten Koordinator, supervisor).

- membuat Rencana Kerja di realisasi kunjungan setiap 15 hari sekali ke BPP (Penyuluh Nagari).

3. Dana Produktif BPP

Untuk pembiayaan BPP, disediakan dana yang besarnya Rp 10.000.000,- untuk setiap BPP yang dikelola oleh Koordinator Penyuluh Pertanian, dan peruntukannya untuk kegiatan usahatani produktif. Seluruhnya terdapat 12 (dua belas) BPP.

Diharapkan laba kegiatan usaha ini untuk:

- pembayaran PAD sebesar 0% dari modal pokok yang dibayar setiap akhir tahun.
- operasional BPP

4. Dana Rutin Operasional Kelompok Jabatan Fungsional

Pemda menyediakan Rp. 85.000.000,- untuk ATK, honor Tim Penilai, Perjalanan Supervisi Tim Kabupaten dan BPP, bantuan operasional kendaraan roda dua, langganan Sinar Tani/Trubus.

Selain penyediaan dana diatas, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten diberi tunjangan operasional yang sama dengan pejabat struktural eselon III di Dinas Pertanian. Rencananya mulai tahun 2004, Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP tunjangan operasionalnya disamakan dengan pejabat struktural eselon IV di Dinas Pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Ir. Yanuar, pergeseran jabatan fungsional penyuluh pertanian menjadi jabatan struktural sangat selektif. Sampai saat ini hanya 3 orang penyuluh pertanian yang memegang jabatan struktural. Hal ini disebabkan karena peran penyuluh pertanian sangat diperlukan. Satu

hal yang perlu diketahui, penyuluh pertanian dalam menyampaikan informasi tidak perlu polyfalen. Apabila ada masalah diluar spesialisasi keilmuannya, dapat dibantu oleh koordinatornya atau penyuluh pertanian lain yang keahliannya sesuai dengan kebutuhan petani.

Ada satu hal menarik yang merupakan terobosan yang dilakukan oleh bapak bupati, yaitu mengenai sertifikasi ternak. Lahan di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya tidak dapat dibuat sertifikat, karena terdiri dari tanah ulayat, sehingga para petani tidak punya agunan untuk meminjam uang dari bank. Saat ini dilakukan terobosan dengan melakukan sertifikasi ternak besar (sapi dan kerbau), sehingga setiap ternak punya sertifikat pemilikan. Sertifikat ini bisa dijadikan agunan untuk meminjam uang di bank. Apabila petani butuh uang, mereka tidak menjual ternaknya, tetapi meminjam uang di Bank, dan uangnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk beli anak sapi. Sehingga ada 3 keuntungan akibat terobosan tersebut, yaitu: kebutuhannya terpenuhi, ternaknya tak terjual, bahkan tambah anak sapi. Akibatnya diharapkan akan terjadi peningkatan populasi ternak.

Semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ini menurut Pak Bupati adalah merupakan kegiatan awal, yang diharapkan ke depan adalah para petani di Kabupaten Tanah Datar dapat memilih sendiri usaha tani yang sangat menguntungkan bagi mereka dan para penyuluh menjadi konsultan yang dicari oleh petani.

Khusus untuk Departemen Pertanian, harapan beliau adalah adanya penghargaan terhadap apresiasi daerah. Dibuat suatu *pilot project*. Apabila ada suatu daerah yang dianggap baik, sebaiknya dijadikan

percontohan dan diberi dana tambahan. Untuk itu Kabupaten Tanah Datar siap dijadikan Laboratorium atau percontohan.

Diantara harapan-harapan beliau, tentunya ada juga suatu hal yang mencemaskan beliau, yaitu belum siapnya para penyuluh pertanian dan para petugas Dinas Pertanian dalam menghadapi perubahan paradigma di Departemen Pertanian. Ada lagi yang perlu diketahui, dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengadakan kerjasama dengan pemerintah Negeri Sembilan Malaysia. Kerjasama tersebut merupakan studi banding, dengan melihat/ mengunjungi lokasi-lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Seluruhnya terdiri dari 5 kelompok/ rombongan, dan setiap rombongan terdiri dari ± 20 orang.

- Rombongan ke 1 : kelompok birokrasi.
- Rombongan ke 2 : kelompok pertanian. Terdiri dari penyuluh, petani, petugas Dinas Pertanian dan Camat yang berhasil dibidang pertanian. Khusus Kelompok ini tidak hanya ke Negeri Sembilan, tetapi ke tempat lain yang berhasil dibidang pertanian.
- Rombongan ke 3 : kelompok pendidik. Terdiri dari guru dan petugas Dinas Pendidikan.
- Rombongan ke 4 : Kelompok Wali Nagari.
- Rombongan ke 5 : kelompok Kaum Adat.

Dengan adanya usaha-usaha peningkatan sumber daya manusia yang cukup serius, semoga harapan-harapan dapat terwujud, dan visi "terwujudnya pertanian yang tangguh, mandiri, dan sejahtera" terwujud pula dalam waktu singkat. (FS).



MENCERMATI KERAPUHAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN PEDESAAN KITA

Tulisan ini secara kritis meyoroti kerapuhan kelembagaan perekonomian pedesaan. Hal ini dinilai penting dilakukan karena sudah lebih dari setengah abad, sejak negara Indonesia merdeka, belum pernah terwujud kemandirian perekonomian pedesaan. Walaupun retorika politik tentang pentingnya memandirikan atau memajukan perekonomian pedesaan selama lebih dari tiga dekade telah dikemukakan secara berulang-ulang, namun tetap saja wajah perekonomian pedesaan kita belum menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Berbeda jika kita bandingkan (misalnya) dengan Vietnam, yang beberapa dekade lalu masih dilanda perang saudara yang hebat dan melibatkan negara adidaya Amerika Serikat, dewasa ini telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai “naga kecil” yang tangguh.

Sebuah cerita menarik, sekitar 8-9 tahun lalu rombongan petani Vietnam belajar bagaimana cara bertani kopi pada petani di Lampung. Sekarang ini rata-

rata produktivitas petani kopi Vietnam sudah mencapai sekitar 3 ton per ha, sedangkan petani Lampung masih sekitar 0,5 ton per ha. Dari pandangan peneliti sosial, hal ini mengundang pertanyaan yang serius, “Apa yang menyebabkan masyarakat pertanian kopi di Vietnam relatif cepat berkembang maju?” Hal yang mirip dengan itu adalah “Apa yang menyebabkan masyarakat Jepang, yang pada awal 1940-an babak belur diporakporandakan Amerika Serikat, pada awal 1980-an secara mengejutkan telah menjadi negara industri maju yang sulit ditandingi negara manapun?”

Keberhasilan dalam membangun sistem kelembagaan yang sehat merupakan “kunci kemajuan” perekonomian suatu masyarakat. Oleh sebab itu, jika sistem kelembagaan suatu masyarakat dibiarkan rapuh maka tak akan ada peluang bagi masyarakat tersebut memajukan atau memandirikan perekonomiannya.

Para perancang kebijakan pembangunan pedesaan baik di pusat maupun daerah belum menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi. Paling tidak ada empat aspek kelembagaan yang mereka perlu pahami, yaitu: kepemimpinan, tata nilai, keorganisasian sosial dan tata (otonomi penyelenggaraan) pemerintahan (daerah) yang sehat. Karena adanya kekurangpahaman tadi, banyak ditemukan operasionalisasi kebijakan pengembangan kelembagaan pedesaan di lapangan yang bukan saja sulit mencapai hasil yang diharapkan namun juga (justru) menimbulkan pengrusakan dan gejala kontra produktif terhadap khasanah lembaga setempat yang sudah lama hidup dan berakar pada budaya setempat. Apapun bentuk dan jenis lembaganya, jika upaya pengembangannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah universal dan diterima masyarakat setempat maka hal itu akan menimbulkan kemubaziran.

Keteringgalan pertanian dan pedesaan

Membandingkan hasil penelitian Hasselman (1914), yang dikutip oleh Husken dan White (1989), dengan Sensus Pertanian (1993) memberikan gambaran bahwa selama hampir seabad

pertanian Indonesia (jika tidak dapat dikatakan mengalami kemunduran) tidak menunjukkan perbaikan berarti, terutama dilihat dari struktur penguasaan lahan (yang “stabil” dalam keadaan timpang) dan kesejahteraan petani.

Sangat menarik membandingkan keadaan pertanian Indonesia antara jaman pemerintah Hindia Belanda (1900-1920-an) dan jaman reformasi (1990-2000-an). Mengapa pada jaman Hindia Belanda pertanian Indonesia sangat besar perannya dalam perekonomian negara dan perdagangan hasil pertanian dunia? (Menurut Prof Sajogyo, jika tidak ada pertanian tebu dan padi di Jawa pada abad 18-19, mustahil kota Amesterdam dan kemajuan negara Belanda terwujud seperti sekarang ini). Mengapa pula dewasa ini sistem usaha pertanian kita terpuruk dan bahkan pasar pertanian domestik kita diserbu produk pertanian dari luar?

Masalahnya tentu bukan terletak pada ketersediaan sumberdaya alam. Lebih tepat jika dikatakan bahwa masalah keterbelakangan pertanian kita saat ini terletak pada lemahnya kualitas SDM dan tatanan kelembagaan yang mendukung sistem usaha pertanian di pedesaan.

Secara manajerial, sistem usaha pertanian Indonesia di jaman Hindia Belanda ditangani oleh tenaga-tenaga trampil dari Hindia Belanda. Masyarakat pedesaan tidak lebih diposisikan sebagai pekerja upahan atau buruh yang harus

patuh pada majikannya. Sejak pemerintahan Orde Baru, pembangunan pertanian di pedesaan tidak mengalami pemihakkan pada kemajuan perekonomian pedesaan secara konsisten dan berkelanjutan. Kemajuan perekonomian pedesaan agak tertolong karena keberhasilan intensifikasi padi sawah, walaupun menurut Sajogyo (1974) keberhasilan tersebut belum memberikan manfaat yang adil bagi golongan petani kecil dan buruh tani. Munculnya gejala marginalisasi petani dan pemiskinan struktural muncul dan sebagai hasil ikutan dari modernisasi pertanian padi sawah (di Jawa) sangat kentara.

Saat ini sistem kelembagaan penyuluhan pertanian juga sudah mengalami perubahan yang dramatik. Lembaga penyuluhan yang dahulu berpusat di BPP dengan program yang terarah, saat ini peranannya sudah sangat jauh dari memadai. Dengan diberlakukannya otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah), kegiatan penyuluhan pertanian di banyak daerah hampir sampai pada titik nadir.

Potensi pertanian Indonesia untuk bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional hingga saat ini masih sangat besar. Dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional, perkembangan pertanian kita masih jauh dari maksimal. Dapat dikatakan bahwa masalah "salah urus"

menjadi faktor penting terjadinya keterbelakangan pertanian dan pedesaan seperti yang terjadi hingga dewasa ini. Selain karena menonjolnya gejala ignoransi yang terdapat pada para perumus kebijakan dan penyelenggara pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memahami masalah pertanian yang berkembang di pedesaan, keterbelakangan pertanian disebabkan juga oleh adanya krisis inovasi di bidang kelembagaan ekonomi pedesaan..

Secara umum tampak jelas bahwa pemahaman para perancang kebijakan di tingkat EKUIN (Ekonomi Keuangan Industri) tentang besarnya potensi pertanian untuk kemandirian perekonomian nasional masih sangat rendah. Patut disayangkan, ternyata banyak juga dari kalangan ahli ekonomi pertanian kita yang masih memiliki pemahaman seperti para perancang di tingkat EKUIN itu.

(Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ahli ekonomi timur jauh seperti Boeke (1953), yang menunjukkan pemahaman yang sangat kuat tentang besarnya kekuatan pertanian di pedesaan). Kebijakan EKUIN yang terlalu memanjakan sektor perkotaan, industri dan jasa yang tidak terkait erat dengan pertanian dan perekonomian pedesaan menunjukkan bahwa penyelenggara negara sangat "miskin" pemahamannya terhadap

pentingnya pertanian dalam perekonomian pedesaan dan nasional.

Sumberdaya alam dan lahan pertanian, terutama lahan kering dan rawa, di luar Jawa yang belum terurus masih luas. Jika sumberdaya alam dan lahan di luar Jawa tadi disentuh tangan trampil dan investasi publik, terutama berupa prasarana ekonomi dan tatanan kelembagaan ekonomi yang baik, akan bisa dipandang sebagai banggunya “raksasa yang sedang tidur”.

Kepemimpinan sebagai penggerak kemajuan

Kepemimpinan secara sosiologis adalah penggerak perubahan masyarakat. Kemajuan suatu masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, sangat ditentukan oleh ciri kepemimpinan yang melekat pada para elit atau pemimpinnya. Kartodirdjo (1984) menyebutkan bahwa dengan mempelajari peranan elit masyarakat, khususnya pemimpinnya, bisa dijelaskan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan pemimpin dalam masyarakat pedesaan, dengan demikian, sangat menentukan peluang dan tingkat kemajuan masyarakat pedesaan. Hal ini juga sangat relevan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia.

Aspek kepercayaan (*trust*) dalam kepemimpinan untuk menggerakkan

masyarakat ke arah kemajuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tokoh tani yang dimaksud di atas sangat memahami pentingnya kepercayaan ini untuk mendorong kemajuan perekonomian desa se-tempat. Ia bersedia mengambil oper “tugas” pejabat pemerintah dengan modal kepercayaan masyarakat tadi, agar program (termasuk bantuan uang petani) tidak mubazir atau bahkan merusak mental petani setempat. Tokoh tani tadi mengkhawatirkan jika “citra buruk” pejabat pemerintah merusak cara berpikir sehat petani, dan kemudian menimbulkan sifat “manja” petani terhadap (bantuan) pemerintah. Jika kemandirian ini muncul, sangat dikhawatirkan daya kreatif petani dalam mengelola sumberdaya pertanian setempat akan merosot.

Seorang tokoh tani dihargai dan dihormati masyarakat (petani) karena ia bisa menunjukkan keunggulannya dalam pemecahan masalah produksi dan ekonomi pertanian setempat. Penemuan cara pemecahan masalah tersebut sangat terbuka untuk dimanfaatkan petani setempat. Ia mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan dengan pengetahuan tadi ia bisa memperlihatkan kehebatannya dalam bentuk hasil kerja yang lebih baik dan efisien. Selain itu, ia juga sangat peduli dengan permasalahan petani di bidang ekonomi. Ia berhasil mengajak petani setempat mengembangkan organisasi

bisnis padi sawah berintikan produksi benih lokal, dan setelah 5-8 tahun berjalan hal itu telah berdampak besar pada kemajuan kehidupan perekonomian petani setempat.

Ada beberapa hal penting yang bisa dicatat di sini, bahwa : *pertama*, dalam menjalankan kepemimpinannya, keberadaan tokoh tani tadi sangat sesuai dengan pemecahan masalah yang dihadapi petani setempat, terutama untuk memajukan perekonomian desa setempat. *Kedua*, apa yang ia kerjakan (sebelum orang lain diminta mengikutinya) menggambarkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam memecahkan masalah nyata di lapangan, sehingga masyarakat petani percaya bahwa ia bukan tipe orang yang “asal ngomong”. *Ketiga*, sebelum mengerjakan sesuatu tokoh tadi telah memiliki visi ekonomi yang jelas dan visi tersebut sangat implementatif untuk memecahkan masalah keterbelakangan ekonomi setempat. Dengan visi tokoh tani yang jelas, masyarakat setempat secara kolektif terinspirasi untuk menunjukkan kemampuan bekerjanya secara lebih baik agar ekonomi rumah tangganya meningkat. *Keempat*, tokoh tani tadi juga memberikan contoh bahwa bekerja secara kolektif dan terorganisir akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding bekerja secara individual. Persaingan individu dalam kelompok bisa diarahkan untuk memacu prestasi individu dan mendinamisasi kelompok

tani, sehingga kemajuan individu bisa ditransmisikan menjadi energi kolektif kemajuan masyarakat setempat.

Peran seorang pemimpin sangat penting untuk menggerakkan kemajuan ekonomi setempat. Salah satu peran penting seorang pemimpin adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat secara kolektif. Dalam rangka mewujudkan penerapan cara-cara rasional dan demokratik dalam merespon setiap perubahan atau tantangan kemajuan, kolektivitas masyarakat sangat membutuhkan keberadaan seorang pemimpin yang andal. Ciri kolektivitas yang terdapat di sebagian besar budaya etnis di Indonesia telah membentuk pola hubungan pola “masyarakat panutan” atau masyarakat paternalistik. Masyarakat membutuhkan seorang yang bisa dijadikan panutan, yaitu seorang pemimpin yang bisa dianggap mewakili dan mewujudkan “impian” masyarakat secara kolektif. Adakah program pemerintah yang diarahkan bisa menggaransi kehadiran seorang pemimpin di pedesaan yang demikian ini?

Tata nilai kemajuan

Beberapa bulan lalu penulis bertanya pada seorang petani di (Kabupaten Badung) Bali. “*Mengapa bapak memaksakan diri membayar kredit pertanian, padahal tanaman padi sawah bapak terkena puso?*”. Petani

tadi menjawab: “*Pak, namanya hutang harus dibayar. Memang sawah saya terkena puso, tapi apa kata orang jika saya dikira tidak mau bayar hutang*”. Penulis bertanya lagi: “*Apa bapak akan membayar kredit dari hasil panen padi di musim berikutnya?*”. Dijawab petani tadi: “*Oo, ya tidak. Kredit adalah hutang dan saya harus segera melunasinya, malu jika harus menunggu panen berikutnya. Saya akan bekerja apa saja, terutama dari memburuh, untuk mendapatkan uang agar hutang saya segera lunas*”.

Karena itu bisa dimengerti mengapa tunggakan kredit pertanian di Bali, khususnya yang terkait dengan intensifikasi padi sawah, sangat rendah. Menurut Boulding (1966) kemajuan ekonomi masyarakat Jepang dilatarbelakangi tingginya rasa malu dan harga diri orang (“masyarakat”) Jepang. Mereka sangat merasa malu (jika tidak bekerja) dan dinilai tidak berharga diri jika tidak memiliki prestasi dalam bekerja.

Kemajuan ekonomi dapat dijadikan indikator prestasi kerja individu atau kolektivitas suatu masyarakat pedesaan. Kebanyakan kalangan ahli ekonomi neoklasik menganggap bahwa motivasi seseorang bekerja keras adalah untuk mendapatkan insentif ekonomi. Ibaratnya seseorang baru mau bekerja jika ia dijanjikan akan mendapat makanan atau kebutuhan (“nafsu”) individunya terpenuhi. Pengertian bahwa

bekerja sebagai ekspresi harga diri atau untuk amal ibadah dinilai hanya utopia. Namun dalam makalah ini harus penulis tegaskan, bahwa ternyata motif bekerja bagi masyarakat Bali dan Jepang tidak semata-mata alasan ekonomi. Justru dengan memandang bahwa motif bekerja adalah karena rasa malu (jika dinilai tidak tidak terpakai atau menganggur) dan menegakkan harga diri atau (untuk memenuhi) panggilan suci (“agama”), perkembangan ekonomi suatu masyarakat pedesaan (khususnya di Bali) bisa bertahan dan maju relatif cepat.

Sifat haus terhadap inovasi bisa dipandang sebagai bagian dari tata nilai yang bagus untuk kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan. Biasanya kehausan terhadap inovasi terkait erat dengan besarnya motivasi masyarakat untuk menunjukkan prestasi atau kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang ekonomi. Jika masyarakat mengandalkan “simbol-simbol” kejayaan promordialisme atau masa lalunya untuk memperoleh kemudahan dalam kegiatan ekonomi, tanpa diikuti dengan usaha untuk berprestasi, hal itu bisa menjadi bencana kolektif. Tata nilai yang baik adalah bahwa masyarakat sekarang seharusnya menjadi duta kehormatan bagi kejayaan generasi masa mendatang, dan bersedia menginvestasikan surplus hasil kerjanya untuk modal kemajuan generasi masyarakat berikutnya. Jika suatu masyarakat lebih senang meminjam

kejayaan generasi masa lalunya atau merampas hak generasi, mendatang untuk mendapat keenakan hidup sesaat, bersiap-siaplah untuk menjadi obyek hujatan generasi masyarakat berikutnya.

Struktur dan keorganisasian ekonomi

Sudah sekitar seabad tatanan atau struktur masyarakat pertanian Indonesia sangat timpang. Lebih dari 80 persen petani menguasai lahan di bawah ukuran 1 ha per KK, dan sebagian besar petani menguasai lahan rata-rata kurang dari 0,5 ha per KK. Lebih dari 50 persen jumlah petani berlahan sempit ini hanya menguasai 21 persen dari keseluruhan lahan pertanian, sementara itu sekitar 20 persen petani (berlahan luas) sisanya menguasai lebih dari 50 persen dari keseluruhan lahan pertanian. Perkembangan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa di satu sisi semakin banyak jumlah petani yang menguasai lahan berukuran sempit, dan di sisi lain jumlah keseluruhan lahan yang dikuasai petani berlahan luas semakin besar. Dengan gambaran demikian, gejala marginalisasi petani dan kemunduran perekonomian pedesaan menjadi sulit dielakkan.

Kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan di negara yang berkembang cepat, seperti pada kasus di Korea, Jepang dan Vietnam, umumnya dilandaskan pada tatanan penguasaan

lahan pertanian yang relatif merata. Selain itu kemajuan ekonomi di tiga negara tersebut dilatarbelakangi oleh keorganisasian kelompok tani yang relatif kuat. Dengan struktur penguasaan lahan pertanian yang relatif merata memudahkan para petani mengembangkan sistem keorganisasian ekonominya yang relatif mandiri dan kuat. Organisasi petani tersebut juga bisa dijadikan alat politik untuk menekan pemerintah agar kepentingan ekonomi, sosial dan politik mereka terpelihara dengan baik.

Organisasi ekonomi pedesaan, terutama yang dibentuk pemerintah, umumnya tidak dilandaskan pada tatanan penguasaan lahan yang sehat dan penggunaan khasanah atau inti budaya setempat, sehingga terkesan disamping organisasi tersebut sulit berkembang juga tidak mengakar pada kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Kebijakan sentralisme penyelenggaraan pembangunan pertanian dan pedesaan selama sekitar 3 dekade terakhir menjadikan organisasi ekonomi pedesaan yang berakar pada budaya setempat semakin rapuh. Organisasi apapun di pedesaan yang ada pada kurun waktu itu harus tunduk pada otoritas pemerintahan desa, yang saat itu kekuasaannya terpusat pada Kepala Desa. (Ini sejalan dengan diterapkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa). Organisasi ekonomi atau produksi, seperti KUD

dan kelompok tani, umumnya adalah bentukan pemerintah pusat dan fungsinya lebih banyak untuk melancarkan kepentingan pejabat dalam menjalankan pekerjaan birokrasi di tingkat kecamatan dan pedesaan. Sehingga bisa dimengerti jika pada saat ini banyak KUD yang sudah tidak jalan, dan bahkan meninggalkan sejumlah tunggakan hutang yang tidak sedikit.

Keorganisasian ekonomi pedesaan yang mengelola usaha pertanian ada tiga pola, yaitu pola pemerintah, tradisional dan pasar. Ketiga pola tersebut memiliki kesamaan, yaitu adanya konsentrasi “kekuasaan” pada penguasaan permodalan. Ketiganya, memiliki peluang yang sama dalam mengeksploitasi petani. Petani tidak memperoleh bagian nilai tambah yang wajar. Hubungan interdependensi atau kemitraan yang terbentuk mencirikan interaksi yang sangat asimetris, dan hal ini dinilai tidak menguntungkan bagi perbaikan perekonomian petani dan pedesaan. Perlu dikemukakan bahwa ada keterkaitan erat antara lemahnya kekuatan politik petani dan terbelakangnya ekonomi petani. Keterkaitan ini sebaiknya dibaca, bahwa karena hak-hak politik petani lemah maka petani sulit mengembangkan kekuatannya dalam berorganisasi di bidang ekonomi.

Otonomi penyelenggaraan pemerintahan

Pemberian otonomi pada pemerintah atau masyarakat daerah seharusnya mendekatkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi setempat. Beberapa minggu lalu seorang petani di Bali menyatakan pada penulis: *“Pak, saya lihat di TV janji calon Anggota DPRD sebelum Pemilu telah membuat masyarakat petani di pedesaan terbuai mimpi... Tetapi setelah duduk jadi Anggota DPRD mereka ini mirip dengan politisi dan Anggota DPR/MPR di Jakarta ... mereka telah mengatasnamakan kepentingan rakyat dan petani untuk mendapat kekayaan pribadi ...”*. Masyarakat petani tampaknya telah cukup cerdas melakukan penilaian terhadap kinerja elit politik pusat dan daerah, namun mereka ini belum tahu bagaimana menyalurkan implikasi penilaiannya secara nyata dalam kehidupan politik lokal.

Dapat ditarik gambaran bahwa masyarakat petani sudah memahami tentang pentingnya otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hanya saja saluran mereka untuk menyalurkan aspirasi riilnya dalam penentuan keputusan publik (“politik”) di tingkat kabupaten/kota masih belum jelas. Dalam Seminar ISI tanggal 5 Agustus 2003 lalu telah dibahas tentang masih *“nggantungnya”* otonomi di tingkat kabupaten/kota. Jarak politik antara pemerintah kabupaten/

kota dan desa masih jauh, hampir tidak berbeda jauh dengan jarak politik antara masyarakat pedesaan dan elit politik di Jakarta. Diakui oleh Soedarsono H. (2003) bahwa harapan ideal otonomi dalam kenyataan masih jauh.

Idealnya dengan diberlakukannya keputusan politik tentang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah posisi masyarakat pedesaan memperoleh peluang yang lebih baik untuk mengembangkan kedaulatannya, terutama di bidang ekonomi. Dari penelitian Pranadji (2001) di Lampung diperoleh gambaran bahwa penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tersebut memerlukan penyesuaian lapangan yang cukup berat. Perilaku para elit politik daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) masih menunjukkan gejala ketidakdewasaannya sebagai “pengemban amanat rakyat”. Kebanyakan dari mereka ini masih menunjukkan kesan kuat bahwa mereka adalah mesin kekuasaan yang “haus uang dan jabatan”. Secara nyata hal ini dapat ditelusuri pada gejala “*high cost economy*”, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dan pedesaan.

Dapat dikemukakan bahwa otonomi pemerintahan masih belum mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap pelaku ekonomi yang berjumlah banyak di pedesaan. (Bisa dipahami jika dalam masa otonomi sekarang ini para pengamat

kemasyarakatan belum bisa memberikan gambaran positif bagi pengembangan perekonomian masyarakat pedesaan). Sistem perpolitikan di tingkat desa masih terpisah dengan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi di lapangan masih mirip dengan penyemarakkan “panggung politik formal” yang pemainnya adalah aktor-aktor formal peserta Pemilu 1999. Lembaga-lembaga tradisional dan kelompok-kelompok kecil (yang kekuatannya terletak pada jaringan *interpersonal trust*) masih belum mendapat tempat yang layak dalam permainan politik formal di tingkat kabupaten/kota.

Dilihat dari segi manajemen sosial, otonomi belum memberikan garansi nyata pemberdayaan masyarakat pedesaan di bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa alasan, *pertama*, keputusan-keputusan politik (misalnya dalam bentuk Perda) lebih banyak didasarkan pada rasionalitas yang belum jelas. Beberapa Perda yang kebanyakan terfokus pada pemberian legitimasi untuk melakukan pungutan di jalan, dengan alasan pening-katan PAD, menimbulkan efek kontra produktif terhadap pengembangan perekonomian pedesaan. Harga input pertanian dan biaya transaksi untuk pengembangan pertanian di pedesaan menjadi lebih mahal. Biaya pemasaran yang meningkat akibat banyaknya “pungutan

liar” berlegitimasi Perda (otonomi) banyak ditemui di banyak daerah pedesaan.

Kedua, masyarakat petani di pedesaan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kabupaten, walaupun substansi keputusan politik tersebut sebagian besar menyangkut kepentingan masyarakat pedesaan. Keadaan ini dapat ditafsirkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik tidak menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Kemajuan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan petani belum dijadikan ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dan desa. (Masyarakat petani hampir sama sekali tidak dilibatkan dalam pemberian informasi dan argumentasi dalam setiap pengambilan keputusan publik).

Ketiga, hasil keputusan politik di tingkat kabupaten/kota di satu sisi memang memberikan kesempatan besar bagi peningkatan kesejahteraan para elit politik dan pejabat pemerintahannya, namun di sisi lain masih mengabaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik tersebut belum merepresentasi kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat petani di pedesaan. Selain keputusan ini dilakukan

dengan cara yang tidak melibatkan masyarakat (*demos*= rakyat, tidak demokratis) juga tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak. Masih terkesan adanya hubungan yang alienatif (“terasing”) antara elit penguasa lokal dan masyarakatnya.

Keempat, banyak ditemukan bahwa hampir setiap peraturan atau keputusan lembaga publik/pemerintah di tingkat kabupaten/kota cenderung dianggap final. Keabsahan suatu peraturan atau Perda tidak didasarkan pada substansi dari peraturan yang disahkan DPRD, melainkan lebih didasarkan pada kekuatan anggota partai politik yang menguasai lembaga DPRD. Keputusan politik yang kebanyakan dilakukan secara terburu-buru banyak yang tidak sesuai dengan perubahan suasana dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun hal itu hampir tidak pernah dilakukan koreksi atau proses pengauditan secara terbuka. Jika terdapat upaya sosialisasi suatu peraturan, umumnya masyarakat pedesaan hanya diposisikan sebagai pendengar dan tidak diberi hak melakukan koreksi. Masyarakat pedesaan, yang seharusnya dijadikan “mitra strategis” oleh para politisi lokal dan pengambil keputusan publik, hingga saat ini secara sepihak justru hanya diposisikan sebagai penonton panggung politik yang pasif. (Tri Pranadji)

MEMBACA ANOMALI IKLIM MENJADI PELUANG USAHA

Oleh : Kusnun

Penyuluh/Mahasiswa APP Yogyakarta

Iklim merupakan fenomena alam dan faktor eksternal dalam usaha Agribisnis yang selalu menarik untuk dipelajari, sebab walaupun menjadi faktor luar tetapi sangat menentukan dalam keberhasilan Agribisnis. Pada umumnya secara otodidak petani telah belajar sendiri dari alam mengenai iklim, terutama tentang musim-musim yang terjadi disekitarnya dan biasanya menjadi patokan mereka untuk menentukan saat tanam, saat panen dan jenis tanaman apa yang cocok untuk daerah tersebut. Keterampilan tersebut juga diperolehnya secara turun temurun dari nenek moyangnya. Biasanya cara-cara tersebut dapat berhasil dengan baik dimasa lalu, tetapi seiring dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh perubahan global iklim dunia yang mengakibatkan terganggunya Iklim setempat karena kerusakan hutan, pengaruh emisi gas buang, bencana alam dan lain-lain menjadikan petani kesulitan membaca iklim global. Kerugian akibat kegagalan yang disebabkan oleh bencana alam baik banjir, kemarau yang

berpanjangan ataupun datangnya kemarau terlalu dini menjadikan banyak petani menderita gagal panen. Hal ini sulit diantisipasi petani sebab kejadiannya diluar jangkauan prediksi petani. Untuk mengatasi kerugian terulang kembali dalam usaha taninya maka disarankan kepada petani sebagai berikut :

1. Petani sudah saatnya inovatif dan rajin mencari informasi iklim kepada instansi terkait dan petugas lapangan.
2. Petani harus kreatif memadukan inovasi baru dari teknologi tepat guna dan rekayasa sendiri untuk perbaikan cara bercocok tanam.
3. Petani telaten untuk membiasakan mencatat sendiri saat-saat hujan di wilayahnya, lamanya hujan dan intensitasnya setiap terjadi hujan untuk dipelajari pola hujan dikemudian hari untuk menentukan waktu tanam.
4. Petani juga mesti rajin survey kepasar pada saat apa/bulan berapa jenis-jenis komoditas itu langka dipasar dan harganya tinggi atau

rendah. Hal ini dicatat terus menerus selama 5 tahun guna untuk mempelajari pola distribusinya pasar. Sebagai data tambahan boleh diadakan konfirmasi kepada pedagang pasar.

5. Mencatat musim panen daerah lain penghasil komoditas serupa yang dipasarkan pada pasar tujuan sehingga dapat membaca pangsa pasar dan quota sisa yang mungkin diisi oleh petani tersebut.

Dengan jeli dan kreatif menginventarisir faktor-faktor tersebut diatas diharapkan petani mampu berusaha tani dengan baik. Dengan membaca Anomali iklim menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Polanya dapat ditempuh dengan cara menanam komoditas diluar musim dengan menggunakan tehnologi tepat guna, sehingga hasil panennya dapat berhasil dengan baik dan mendapat harga yang layak bahkan tinggi.

Di Kabupaten Muara Jambi ada petani yang bernama Bapak A. Buhadi yang menanam cabe pada saat panen raya yang biasanya jatuh pada musim kemarau, tantangan musim kemarau inilah yang dirubah oleh petani itu agar nantinya pada saat ia panen jatuh pada musim hujan dimana orang-orang lain atau petani lain baru mulai menanam

cabe. Sehingga diwaktu panen pada musim hujan distribusi cabe di pasar menjadi kurang dan harganya mahal. Pada saat inilah petani meraup untung. Biasanya masa-masa harga cabe dipasar itu menjadi mahal tidak bertahan lama lebih kurang hanya satu bulan, sebab pada pasar itu sendiri terjadi teori *Supply and Demand* dimana pasaran menunjukkan harga mahal terhadap komoditas tertentu akan disupply oleh daerah lain yang harganya lebih murah. Jadi sekali lagi kesempatan petani untuk memperoleh tingkat harga yang baik itu tidaklah lama. Pertanyaannya kini bagaimana petani tersebut mensiasati kemarau itu agar tanaman cabenya dapat hidup dan tumbuh wajar serta menyelamatkan buah cabe terhadap serangan hama dan pe-nyakit yang sangat tinggi dimusim hujan.

Hal itulah kunci permasalahan agar sukses jadi petani seyogyanya sudah akrab dan trampil dengan tehnologi budidayanya dan cara bercocok tanam untuk iklim yang ekstrim, yaitu dengan modifikasi teknologi dan rekayasa dalam usaha tani seperti sistem mulsa dan PHT yang tepat. Cara-cara ini sangat sederhana tetapi untuk dapat membuat pola tanam yang menghasilkan panen pada iklim yang ekstrim memang butuh keuletan, ketelitian, dan kerja keras. (Kusunun)

KONGRES PEMUDA TANI SEDUNIA DI PARIS, PERANCIS

Kongres Pemuda Tani Sedunia diselenggarakan tanggal 11 s.d. 14 Juni 2003 di kota Paris, Perancis. Tema yang dimunculkan pada Kongres Pemuda Tani Sedunia : **“Young Farmers: The Price of Our Future”**. Kongres ini diikuti oleh 120 negara. Indonesia diwakili oleh 2 (dua) orang Pemuda Tani (Ir. Winarno Tohir dan Adinindyah Arya Wisnutama) dan 2 (dua) orang Pendamping (Ir. M. Anas Rasyid - Sekretaris Badan Pengembangan SDM Pertanian dan Dr. Ir. Amrin Zakaria - Kapus Pengembangan Penyuluhan Pertanian). Kongres Pemuda Tani Sedunia dibuka oleh Perdana Menteri Perancis, Mr. Jean-Pierre Raffarin. Selesai pembukaan dilanjutkan dengan acara presentasi makalah mengenai *“Differences In Worldwide Agricultural Development : Reasons And Consequences”* oleh Mr. Marcel MAZOYER dari FAO.

Pada hari ke-2 diselenggarakan 2 (dua) workshop mengenai *“Diversity of Production Types”* dan satu workshop mengenai *“Young Farmer, Taking Action in The Face of International Challenges”*.

Pada hari ke-3 diselenggarakan workshop mengenai *“Renewing of Farming Generations”*, dilanjutkan dengan penutupan Kongres yang dilakukan oleh Presiden Republik Perancis : Mr. Jacques CHIRAC.

Beberapa topik penting yang menjadi pembicaraan hangat pada Kongres Pemuda Tani Sedunia adalah :

1. Bagian terbesar dari penduduk miskin di dunia adalah petani.
2. Harga internasional produk pertanian sekarang ada di bawah harga produksi petani, sehingga petani di negara berkembang mendapatkan income yang rendah, bahkan negatif.
3. Diperlukan penekanan (*political will*) dari pemerintah agar pengembangan inovasi di bidang pertanian lebih ditingkatkan, yang mencakup inovasi di bidang produksi dan pengolahan hasil (pengembangan produk).
4. Penyediaan akses bagi petani-petani muda terhadap permodalan, lahan, dan pasar.
5. Jaminan harga yang layak bagi produk-produk pertanian, terutama yang dihasilkan oleh petani.
6. Jaminan kesejahteraan petani (kasus Perancis).
7. Program pertanian untuk Wanita Tani lebih ditingkatkan (*gender responsive*).
8. Liberalisasi perdagangan untuk produk-produk pertanian.

Kunjungan lapangan

Selain kegiatan workshop, Kongres juga menyelenggarakan kunjungan lapangan ke pusat kegiatan pertanian di

Perancis, antara lain ke perkebunan anggur, peternakan sapi, ladang gandum, petani umbi-umbian, dan pasar produk pertanian. Kongres juga menyelenggarakan “*Agri-Village*” yang merupakan suatu kegiatan expo bidang pertanian yang menampilkan 4 area utama sebagai perwakilan dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, selain itu juga diselenggarakan “*Agri Parade*” yang menampilkan kegiatan pertanian Perancis.

Deklarasi

Kongres ini menghasilkan Deklarasi Bersama (*Joint Declaration of Young Farmers*). Deklarasi Bersama ini mencakup antara lain:

1. *Agriculture* adalah sektor esensial dalam kehidupan manusia.
2. Prinsip bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya sendiri dan memelihara pertanian yang berkelanjutan.
3. *Efficient Farm Policies*, yang mencakup antara lain:
 - a. Perlu adanya peraturan mengenai hak untuk menerapkan sistem tarif yang memadai untuk menjamin harga yang adil untuk petani dan memenuhi harapan masyarakat.
 - b. Kebijakan yang memfasilitasi masuknya para pemuda tani ke bidang pertanian untuk menjamin tersedianya generasi baru petani.
 - c. Perlakuan yang khusus dan berbeda untuk produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh negara berkembang.

4. Meningkatkan kemampuan petani dan organisasi petani (*capacity building*).

5. KESIMPULAN dari Deklarasi Bersama, dinyatakan bahwa pemuda tani sedunia tidak mendukung (*not in favour*) liberalisasi sektor pertanian yang tidak diatur (*not regulated*), sehingga mengakibatkan turunnya harga di pihak petani, pasar internal produk pertanian yang tidak stabil, dan berkurangnya akses pada lahan untuk petani skala kecil.

Deklarasi Bersama ini dan hasil-hasil kongres akan disampaikan pada Sidang WTO di Cancun, Meksiko pada bulan September 2003.

Pertemuan dengan Duta Besar dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris

Pertemuan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2003 di ruang kerja Duta Besar. Topik pembicaraan adalah tindak lanjut hasil pembicaraan Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian Perancis mengenai kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan tukar menukar kunjungan petani kedua negara. Di bidang pendidikan, ada tiga model pendidikan yang dibicarakan, yaitu:

1. Peserta didik belajar secara penuh di Perancis dengan biaya dari Pemerintah Indonesia dan Perancis.
2. Program “*Sandwich*”, peserta didik mengikuti kelas yang diselenggarakan di Indonesia dan di Perancis.
3. Para pendidik dari Perancis kedatangan untuk mengajar di

Indonesia dalam suatu periode tertentu.

Model pertama, menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan model kedua biaya tidak begitu besar, tetapi perlu pengakuan (akreditasi) dari Depdiknas. Model ketiga dianjurkan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipilih, karena biayanya murah. Dengan model ketiga ini, Pemerintah RI hanya menyediakan tempat untuk pendidikan dan perumahan untuk para pendidik dari Perancis, sedangkan biaya untuk para pendidik dari Perancis disediakan oleh Pemerintah Perancis.

Kurikulum untuk semua model pendidikan ini disusun bersama oleh pihak Perancis dan Indonesia. Pemerintah Perancis juga bersedia untuk mengeluarkan sertifikat.

Dalam pembicaraan ini, Sekretaris Badan dan Kapusbangluhtan mengusulkan STTP Bogor, PMPSDMP Ciawi, STTP Magelang/Yogyakarta sebagai kampus-kampus program kerjasama pendidikan dengan Perancis ini.

Di bidang penelitian, masih diperlukan pembicaraan lebih lanjut dengan CIRAD (Badan Litbang Perancis) untuk menetapkan bidang-bidang penelitian pertanian yang akan dikerjasamakan.

Di bidang pertukaran kunjungan petani, kami mengusulkan kepada Bapak Duta Besar bahwa sebaiknya bukan pertukaran kunjungan petani, tetapi program magang petani Indonesia di petani Perancis, seperti model yang telah dikembangkan dengan Pemerintah Jepang. Bapak Duta Besar menjanjikan akan mengusulkan model ini ke Pemerintah Perancis.

Dalam pertemuan ini, Bapak Duta Besar menginformasikan bahwa dengan Carrefour (Jaringan Swalayan Perancis) telah dijajagi untuk membantu pemasaran produk-produk petani Indonesia melalui jaringan swalayan ini. Pada dasarnya pihak Carrefour telah menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama di bidang ini. Pihak Carrefour juga akan memberikan bantuan teknologi dan manajemen usaha kepada petani-petani peserta kerjasama.

SEKILAS PERTANIAN DI JEPANG

Jepang sebagai sebuah negara dan bangsa merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari oleh bangsa lain. Daya tarik Jepang terletak pada suatu realita bahwa negara yang relatif kecil dan miskin sumber daya

alam ternyata memiliki kemampuan untuk menduduki peringkat ketiga terbesar dalam bidang ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Pendapatan perkapita naik sangat pesat dari US \$ 1.586 (1970) menjadi US \$ 25.616

Tabel. Gambaran profil umum Jepang dibandingkan dengan USA dan Indonesia

No.	Parameter	Jepang	USA	Indonesia
1.	Luas wilayah (km ²)	377.737	3,4 juta	1,9 juta
2.	Penduduk/1999	127 juta	240 juta	210 juta
3.	Jumlah pulau	7.000 buah	ND	17.000 buah
4.	Income / kapita/ tahun	1970 : US \$ 1.586 1998 : US \$ 25.616	- 1998 : US \$ 28.397	1978 : US \$ 600 1998 : US \$ 1.000
5.	APBN Pendidikan 2002	US \$ 65 M	ND	US \$ 2,5 M
6.	Pengangguran	2,3%	ND	> 30%
7.	Tenaga kerja pertanian	4,7%	3,5%	50%
8	Rangking UNDP/HDI ntuk SDM dari 174 negara	3	2	105
9.	S3 / 1 juta penduduk	6.500 orang ***	ND	65 orang ***
10.	Nobel prize	5	193	0
11.	Pemilikan PC/ 1.000 orang	20,21%	40%	ND
12.	TV / 1.000orang	684	805	ND
13.	Radio / 1.000 orang	916	2903	ND
14.	Subsidi ke petani / KK	US \$ 25.000 /Thn	ND	ND
15.	Konsumsi beras / kapita / thn	1965 : 111,7 Kg 1998 : 65,2 Kg	ND	1976 : 100 Kg 1998 : 133 Kg
16.	Swasembada beras	90%	ND	?
17.	Fasilitas ibu hamil	Gratis susu	ND	?

Data by Dr. Jagal W. Marseno, UGM

*** Israel 7.200 S3 / 1 juta penduduk

(1998). Bandingkan dengan Indonesia yang pada pelita I (1969) US \$ 60 dan tahun 2000 hanya naik menjadi US \$ 1.000. Gambaran profil umum Jepang dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Indonesia, dapat dilihat pada tabel.

Dari data tersebut, bisa kita bayangkan bahwa negara Jepang yang memiliki lahan sempit dan mengalami empat musim, hanya bermodalkan SDA berupa ± 7.000 pulau dengan luas 377.737 km dan jumlah penduduk 127 juta jiwa dapat

mensejahterakan rakyatnya setara dengan Amerika Serikat yang memiliki income perkapita US \$ 28.397. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki 17.000 pulau, panjang pantai 81.000 km (No. 2 terpanjang di dunia) dan bila dibentang dari Sabang sampai Merauke setara dengan panjangnya dari Inggris sampai Rusia (Eropa). Mengapa pertanian di Jepang bisa maju ?

Jawabnya ada pada kebijakan pemerintahnya dan etos kerja dari

masyarakat Jepang itu sendiri. Sejak tahun 1961 dalam mengelola sektor pertanian pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan UU yang disebut *The Agricultural Basic Law*, untuk menyongsong abad 21 dengan prediksi perubahan dunia yang sangat cepat. Selanjutnya dibuat kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

1. Pada Juli 1999 di tetapkan *The Basic Law on Food Agriculture and Rural Areas* yang mengatur masa lapangan, pertanian dan wilayah pembangunan pedesaan.
2. Pada Desember 1999 ditetapkan *Fishery Industry Basic Policy* yang mengatur kebijakan dalam pengembangan sektor industri berbasis hasil perikanan.
3. Desember 2000 ditetapkan *Comprehensive Forestry Policy Reform* yang mengatur kebijakan bidang kehutanan.

Bagaimana dengan Indonesia yang sampai kini belum menata dan menyentuh *Agrarian Reform*/pembaharuan agraria ?

Sektor pertanian di Jepang ditangani oleh kantor *Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries* yang terdiri atas beberapa biro antara lain : Biro Kebijakan Pangan, Biro Produksi Pertanian, Biro Perbaikan Manajemen, Biro Pembangunan Pedesaan, Pusat Riset Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Badan Agensi Pangan, Badan Kehutanan, Badan Perikanan, Departemen Statistik dan Informasi, serta Kantor Administrasi Pertanian Daerah.

Subsidi ke petani Jepang/KK US \$ 25.000/tahun sedang income

perkapitanya saja US \$ 25.616/th (1998). Bagaimana di Indonesia tentang subsidi ke petani yang malah dicabut ... ?. Orang Jepang melatih anaknya mandiri sejak kecil dan disiplin. Mereka mengindoktrinasi anak-anaknya bahwa ini dan itu mahal sehingga tidak konsumtif serta menyadarkan anaknya bahwa negaranya miskin SDA. Riset didanai oleh negara dengan dana yang besar dan aplikasinya ke petani begitu cepat, murah, mudah, menggunakan teknologi media elektronik. Pemimpin/peneliti rela berkorban tanpa pamrih, berbeda dengan kita dimana angkatan 45 dan para jenderal nya banyak yang meminta imbalan berupa HPH dll. APBN untuk pendidikan di Jepang 30% dan budaya warisan tanah di petani diperuntukan bagi anak laki-laki tertua atau anak laki-laki berikutnya bila yang tertua tidak berminat menjadi petani. Budaya itu diatur dalam UU hukum pertanahan Jepang sehingga pemilikan tanah petaninya/KK tidak mengalami penyusutan seperti di Indonesia.

Kalau pertanian Indonesia mau tumbuh maju seperti Jepang maka investasi pendidikan pada SDM lah jawabnya yang kelak dapat melahirkan masyarakat Madani yang akan menghasilkan teknologi dan mendorong tumbuhnya berbagai macam industri serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Negara kita terpuruk dan mengalami krisis ekonomi dan krisis multi dimensional karena kita lupa dua hal yaitu "**Kata maaf dan terima kasih**". Mari kita berbenah diri dengan melaksanakan dua kata tadi sehingga krisis di Indonesia dapat teratasi. Semoga. (Kusunun)

REKOMENDASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL
tentang
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dirasakan sangat diperlukan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian. Karena itu Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) merumuskan suatu rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian.

1. Pembangunan Pertanian di Indonesia selama kurun waktu 57 tahun setelah merdeka menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, namun demikian fakta menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan masih jauh dari harapan. Disamping itu kondisi ketahanan pangan nasional dirasakan masih rapuh. Menyikapi hal tersebut diperlukan adanya perbaikan sistem pendidikan yang memberdayakan petani-nelayan secara berkelanjutan dalam bentuk sistem penyuluhan pertanian sehingga petani-nelayan dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri dan melaksanakan usaha agribisnis yang menguntungkan bagi mereka.
2. Perkembangan dunia penyuluhan pertanian di Indonesia dewasa ini sedang mengalami terpaan gelombang ketidak pastian bahkan berada pada fase kritikal. Apabila kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian atau langkah penanggulangannya tidak tepat maka akan berakibat fatal dan akan sulit untuk bangkit kembali. Salah satu upaya kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penyuluhan pertanian yang ada sekarang adalah adanya Undang-Undang Penyuluhan Pertanian.
3. Undang-Undang Penyuluhan Pertanian merupakan produk hukum yang sangat dinanti-nanti kelahirannya baik oleh petani-nelayan, penyuluh pertanian maupun dunia usaha agribisnis. Lahirnya Undang-Undang Penyuluhan Pertanian mempunyai landasan hukum kuat yaitu UUD 1945 yang isinya antara lain bahwa pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Artinya masyarakat

- petani-nelayan juga mempunyai hak yang sama untuk hidup cerdas, dan hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan petani-nelayan melalui penyuluhan pertanian (pendidikan non formal).
4. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem dan lembaga yang diperlukan oleh petani-nelayan untuk terjadinya proses belajar dan mengajar dalam mencerdaskan kehidupan mereka. Kelembagaan penyuluhan pertanian juga merupakan salah satu lembaga esensial yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat pertanian terutama dalam menciptakan dan meraih peluang serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi petani-nelayan dalam membangun dan menjalankan sistem dan usaha agribisnis.
 5. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di pedesaan merupakan sumber pembangkit dan pendorong semangat petani-nelayan dan penyuluh pertanian, serta dapat menumbuhkan kepercayaan diri petani-nelayan, pelaku agribisnis lainnya dan penyuluh. Kelembagaan penyuluhan pertanian juga merupakan tempat penyuluh berkreasi, berinovasi, berorganisasi, dan sebagai sumber informasi dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Melalui lembaga penyuluhan ini akan tumbuh dan berkembangnya kemandirian petani-nelayan sebagai subyek yang tangguh dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.
 6. Substansi Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sebaiknya hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok/umum saja. Pengaturan lebih lanjut dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang terkait dalam pengaturan penyuluhan pertanian.
 7. Isi dan RUU Penyuluhan Pertanian disarankan terdiri dari :
 - a. Konsiderans yang berisi pertimbangan tentang pentingnya penyuluhan pertanian, yang penyelenggaraannya merupakan kewajiban pemerintah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian.
 - b. Ketentuan Umum. Pengertian/ Peristilahan (*Glossary*) yang akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang
 - c. Falsafah, Landasan, Asas, Visi, Tujuan, Kelompok Sasaran (Khalayak Pengguna) dan Ruang Lingkup Penyuluhan Pertanian
 - d. Petani-nelayan dan pelaku agribisnis lainnya serta kelembagaannya sebagai

- subyek pembangunan perlu mendapat dukungan dan pemberdayaan melalui penyuluhan pertanian.
- e. Posisi penyuluh pertanian sebagai penggerak pembangunan sistem dan usaha agribisnis
 - f. Sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian meliputi tingkat nasional sampai tingkat operasional.
 - g. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian :
 - k o o r d i n a t o r
p e n y e l e n g g a r a a n
penyuluhan pertanian
 - pengelolaan/manajemen
penyuluhan pertanian
 - kewenangan dan
tanggungjawab pusat dan
daerah
 - pengangkatan dan
pemberhentian penyuluh
pertanian
 - h. Dukungan terhadap penyuluhan pertanian terdiri dari :
 - dukungan politik berupa
kebijakan peraturan dan
perundangan
 - dukungan IPTEK dan
informasi
 - dukungan pendanaan
 - Dukungan kerjasama dari
Perguruan Tinggi, lembaga
penelitian dan instansi/
lembaga terkait
- dukungan pengembangan
SDM : Lembaga Diklat
 - i. Pengawasan untuk menjamin
terselenggaranya penyuluhan
pertanian.
 - j. Panca etika penyuluhan
pertanian.
 - k. Ketentuan Peralihan.
 - l. Ketentuan Penutup.
8. Didalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian secara lengkap disarankan untuk melibatkan/menampung aspirasi atau masukan-masukan terutama dari para penyuluh pertanian, KTNA, para pakar di bidang penyuluhan pertanian serta instansi/lembaga lain yang terkait secara langsung. Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) menyambut baik dan mendukung sepenuhnya adanya semangat dari semua pihak terutama dari Pemerintah (Deptan) dalam melahirkan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, karena ide penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sudah dirintis sejak tahun 1983 (tepatnya tanggal 10 Pebruari 1983) Artinya rintisan tersebut sudah berjalan 20 tahun, namun selalu kandas di tengah jalan. Mudah-mudahan bangkitnya semangat di tahun 2003 tidak putus di tengah jalan.

EKSTENSIA menerima :

Tulisan yang bersitat aktual tidak berkepanjangan, padat, mudah dibaca dan dimengerti, dengan gaya yang enak dibaca. Jumlah 350 kata atau kelipatan bulatnya diketik rapih dan ditandatangani oleh penulis, dikirim ke Ekstensia dengan dilengkapi identitas/photo copy KTP/ Karpeg Penulis.

Untuk rubrik-rubrik :

WAHANA

Tulisan dan gambar/fotonya, berupa feature/berita kisah dan profil dari suatu kelembagaan penyuluhan pertanian, bertujuan untuk membangun motivasi berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOSOK

Tulisan dan gambar/fotonya berupa feature dari sosok Penyuluh Pertanian untuk kontak tani Nelayan/petani maju yang melaporkan keberhasilan (succes story), yang bertujuan untuk sebagai teladan bagi orang lain yang seprofesi.

WAWASAN

Tulisan atau informasi bebas dengan gambar/fotonya, berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, atau pengalaman lapangan dibidang pertanian, atau tulisan dari seorang ahli (peneliti, praktisi) dibidang pertanian, yang bertujuan untuk menambah wawasan.

OPINI

Berupa tulisan pembaca yang merupakan tulisan asli, kondisi faktual dilapangan yang mengemukakan masalah, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian, disertai dengan pemikiran tentang pemecahan masalahnya, (maksimum 350 kata).

SWADAYA

Tulisan dengan gambar/datanya dari kegiatan Swadaya KTNA/Petani-Nelayan bertujuan untuk memotivasi/menggugah keswadayaan Petani-Nelayan yang lain.

GEMA

Tulisan atau berita/informasi bebas, dengan gambar/fotonya, berisi segala sesuatu berkaitan dengan organisasi profesi, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pakar dan Penyuluh Pertanian dalam pengembangan organisasi dan profesinya, baik di pusat maupun cabang-cabangnya di daerah.

Ekstensia mempunyai wewenang yang mandiri untuk menentukan tulisan yang akan dimuat, sedangkan tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan apabila disertai dengan perangko yang cukup.

